

BUKU I

RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN ACEH BARAT



KABUPATEN ACEH BARAT, 2023



KATA SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT

BUKU 1 DRAFT - ACEH BARAT

KATA SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN SMART CITY

BUKU 1 DRAFT - ACEH BARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
1. Analisis Masa Depan.....	1
1.1. Kondisi Umum Daerah.....	1
1.1.1. Profil Kabupaten Aceh Barat.....	1
1.1.2. Aspek Geografi.....	2
1.1.3. Penggunaan Lahan	6
1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah	7
1.1.5. Wilayah Rawan Bencana.....	8
1.2. Isu Strategis.....	11
1.3. Analisis Daya Saing Daerah.....	15
2. Analisis Kesiapan Daerah	20
2.1. Struktur.....	20
2.1.1. Sumber Daya Manusia	21
2.1.2. Sumber Daya Pemerintah.....	29
2.1.3. Kapasitas Keuangan Daerah.....	38
2.2. Infrastruktur.....	49
2.2.1. Infrastruktur Fisik.....	50
2.2.2. Infrastruktur Digital.....	54
2.2.3. Infrastruktur Sosial.....	56
2.3. Superstruktur	58
2.3.1. Kesiapan Kebijakan Daerah	59
2.3.2. Kesiapan Lembaga Daerah.....	62
2.3.3. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah	63
3. Analisis Kesenjangan	65
3.1. Analisis Kesenjangan <i>Smart Governance</i>	65
3.2. Analisis Kesenjangan <i>Smart Branding</i>	66
3.4. Analisis Kesenjangan <i>Smart Living</i>	69
3.5. Analisis Kesenjangan <i>Smart Society</i>	70
3.6. Analisis Kesenjangan <i>Smart Environment</i>	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat.....	2
Gambar 2. Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Barat	4
Gambar 3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Barat.....	4
Gambar 4. Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat.....	5
Gambar 5. Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat	6
Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat	6
Gambar 7. Peta Bahaya Gempa Kabupaten Aceh Barat.....	9
Gambar 8. Peta Potensi Tsunami Kabupaten Aceh Barat.....	9
Gambar 9. Peta Potensi Kebakaran Kabupaten Aceh Barat.....	10
Gambar 10. Peta Potensi Kekeringan Kabupaten Aceh Barat	10
Gambar 11. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019	15
Gambar 12. Indeks Harga Konsumen per Bulan di Kabupaten Aceh Barat (2012=100), 2019	16
Gambar 13. PNS Menurut Golongan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2019.....	17
Gambar 14. PNS Menurut Jenis Kelamin dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2019	18
Gambar 15. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat.....	21
Gambar 16. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d 2019 (Jiwa)	22
Gambar 17. Sebaran Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 (Persen).....	23
Gambar 18. Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat,	25
Gambar 19. Pendapatan per kapita Aceh Barat (Juta Rupiah).....	31
Gambar 20. Persentase ASN di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat Menurut Tingkat Pendidikan	32
Gambar 21. Persentase Ketersedian Peralatan Komputer di Kabupaten Aceh Barat	33
Gambar 22. Persentase Ketersedian Koneksi LAN Antar OPD di Kabupaten Aceh Barat.....	34
Gambar 23. Persentase Ketersedian Pengembangan Aplikasi di OPD Kabupaten Aceh Barat	36
Gambar 24. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019.....	40
Gambar 25. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2017-2019 (Persen).....	42
Gambar 26. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Jumlah Kwh yang terjual.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan.....	2
Tabel 2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat	7
Tabel 3. Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat	7
Tabel 4. Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat	8
Tabel 5. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Aceh Barat,.....	16
Tabel 6. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Aceh Barat,	17
Tabel 7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat,	18
Tabel 8. Statistik Realisasi Investasi Menurut Sektor (PMA & PMDN) di Kabupaten Aceh Barat,	18
Tabel 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Jiwa).....	21
Tabel 10. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019	22
Tabel 11. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan	23
Tabel 12. Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat,.....	24
Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat,	25
Tabel 14. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin	26
Tabel 15. Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat,.....	27
Tabel 16. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen).....	27
Tabel 17. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen).....	28
Tabel 18. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	28
Tabel 19. Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat,	30
Tabel 20. Gambaran distribusi rinci perbandingan jumlah ASN dan Tingkat Pendidikan ASN	32
Tabel 21. Analisis Ketersediaan Infrastruktur Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat	37
Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019.....	40
Tabel 23. Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja 2015 – 2019.....	41
Tabel 24. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2015-2019	42
Tabel 25. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	44
Tabel 26. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	45
Tabel 27. Ringkasan Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.....	47
Tabel 28. Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 - 2021	50
Tabel 29. Jumlah Sarana Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.....	51
Tabel 30. Daftar Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020	51
Tabel 31. Jumlah Kendaraan Umum Penumpang Menurut Nama Perusahaan dan Trayek.....	52
Tabel 32. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	56
Tabel 33. Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat,	57
Tabel 34. Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan	57
Tabel 35. Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan	58
Tabel 36. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah Kabupaten Aceh Barat.....	59
Tabel 37. Daftar Rujukan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat	61
Tabel 38. Kertas Kerja Analisis SWOT Tata Kelola (Governance).....	65
Tabel 39. Kertas Kerja Analisis SWOT Potensi Daerah (Branding).....	66
Tabel 40. Kertas Kerja Analisis SWOT Ekonomi (Economy).....	68
Tabel 41. Kertas Kerja Analisis SWOT Tempat Tinggal (Living)	69
Tabel 42. Kertas Kerja Analisis SWOT Kehidupan Sosial (Society)	70
Tabel 43. Kertas Kerja Analisis SWOT Lingkungan (Environment)	71

1. Analisis Masa Depan

1.1. Kondisi Umum Daerah

1.1.1. Profil Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang menduduki wilayah administratif di Provinsi Aceh Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan Pulau Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km².

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

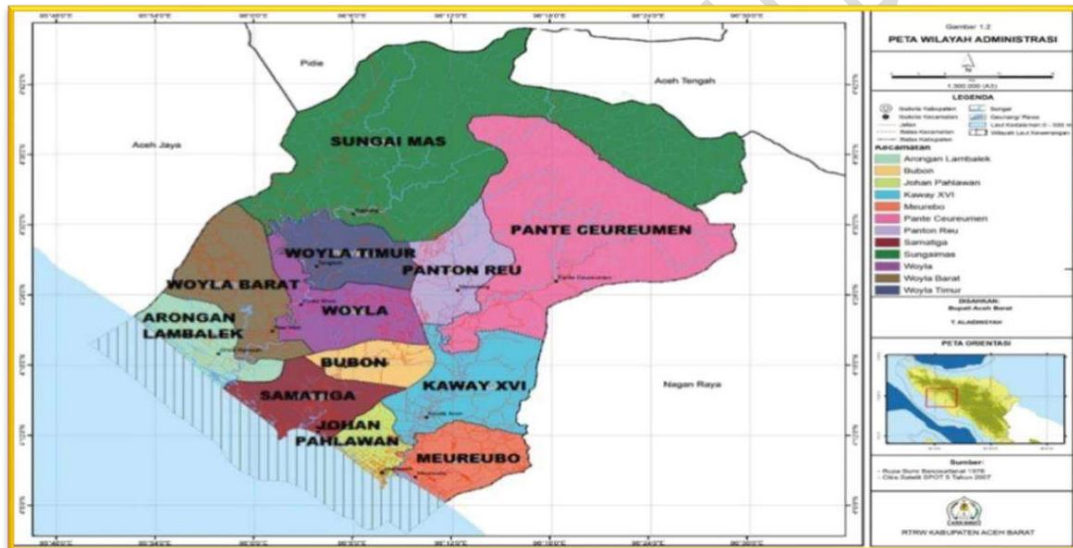
Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa. Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang- undang No. 4 Tahun 2002 (wikipedia, 2019).

1.1.2. Aspek Geografi

Kabupaten Aceh Barat terletak pada bagian pesisir barat Provinsi Aceh, diapit pegunungan bukit barisan di bagian utara dan berhadapan dengan Samudera Hindia di bagian selatan. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak pada koordinat 04o06' - 04o47' Lintang Utara dan 95o52' - 96o30' Bujur Timur dan memiliki luas wilayah darat 2.927,95 Km², lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 Km² serta garis pantai sepanjang 54,84 Km. Aceh Barat memiliki batas wilayah:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Aceh Jaya, Pidie Jaya dan Aceh Tengah;
2. Sebelah Selatan: Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya;
3. Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya; dan
4. Sebelah Barat: Samudera Indonesia dan Aceh Jaya.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 gampong. Untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	44,91	1,53	4	21
2	Samatiga	Suak Timah	140,69	4,81	6	32
3	Bubon	Layueng	129,58	4,43	3	17

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
4	Arongan Lambalek	Drien Rampak	130,06	4,44	2	27
5	Woyla	Kuala Bhee	249,04	8,51	3	43
6	Woyla Barat	Pasie Mali	123,00	4,20	2	24
7	Woyla Timur	Tangkeh	132,60	4,53	2	26
8	Kaway XVI	Peureumeue	510,18	17,42	4	44
9	Meureubo	Meureubo	112,87	3,85	2	26
10	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	490,25	16,74	4	25
11	Panton Reu	Meutulang	83,04	2,84	2	19
12	Sungai Mas	Kajeung	781,73	26,70	2	18
Total Luas			2.927,95	100,00	36	322

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki kemukiman terbanyak yaitu 6 mukim. Sementara itu, jumlah gampong terbanyak berada pada Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan jumlah masing-masing 44 dan 43 gampong.

1.1.2.1. Kondisi Topografi

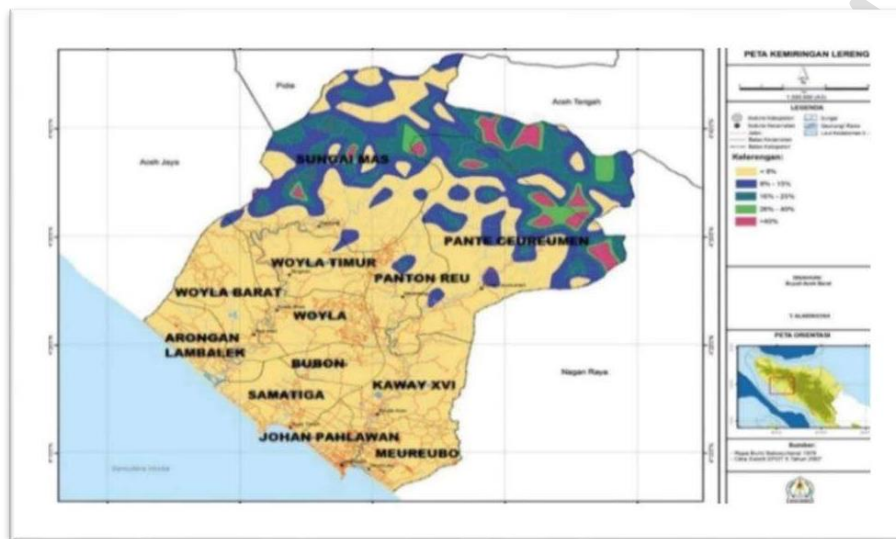
Kondisi fisik Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan bentuk topografi dibagian utara adalah daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan dan termasuk dalam ekosistem Leuser. Berdasarkan kajian lereng dengan menggunakan skala Maberry, maka dapat dikatakan daerah Aceh Barat memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan wilayah karena memiliki sudut lereng berkisar antara 0 sampai 3 persen. Jika ditinjau dari kontur wilayah, sebagian wilayah di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen memiliki ketinggian diatas 1500 mdpl, sedangkan sekitar 20 persen dari keseluruhan wilayah yang merupakan dataran pesisir berada pada ketinggian sekitar 25 mdpl yang mencakup Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo.

1.1.2.2. Kondisi Geologi

Kabupaten Aceh Barat berada diantara dua patahan (sebelah Timur - Utara dan sebelah Barat - Selatan Kota) dan berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia yang berjarak $\pm$ 130 Km dari garis pantai barat sehingga kabupaten ini rawan terhadap tsunami. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian Departemen Pertambangan dan Energi, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi bahan galian/tambang, antara lain batu bara (di Desa Bukit Jaya Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI), emas di Kecamatan Sungai Mas, sedangkan daerah

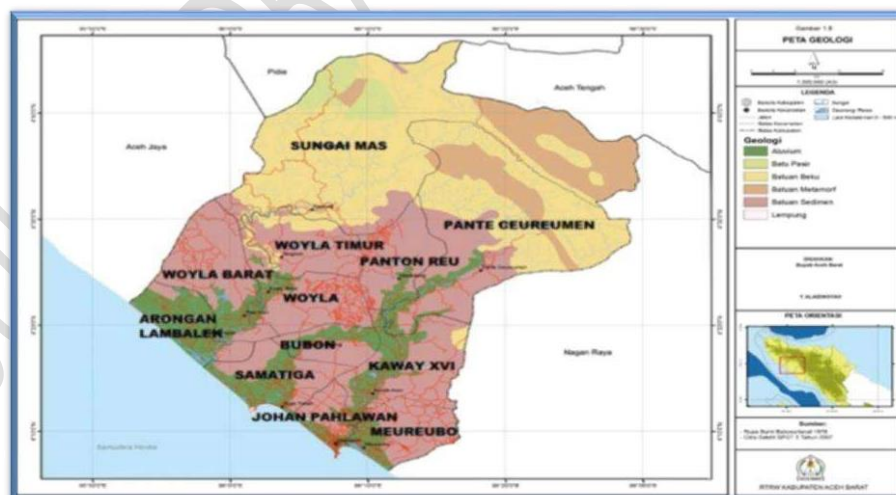
Kecamatan Woyla dan Pante Ceureumen banyak terdapat batu kapur/gamping, batu koral, kerikil, dan pasir.

Keadaan geologi tanah berupa endapan yang mencapai 58,05 persen atau 586.525 Ha. Sebagian besar lahan terdiri dari tanah jenis podsolik merah kuning dengan kedalaman tanah yang relatif dalam, yaitu diatas 60 cm yang terdapat di Kecamatan Kaway XVI dan Sungai Mas, sedangkan kedalaman diatas 90 cm terdapat hampir merata di seluruh Kecamatan. Pada umumnya jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol, litisol, regosol, orgonosol, renzina dan alluvial.



Gambar 2. Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032



Gambar 3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

1.1.2.3. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Aceh Barat sangat besar karena dialiri oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Krueng Woyla dan Krueng Meureubo dengan kapasitas alirannya lebih dari 250 liter/detik. Dengan karakteristik dan pola aliran sungai ini, terdapat permasalahan berupa banjir periodik pada musim penghujan.

Area yang mengalami banjir periodik tersebut adalah pada alur limpasan sungai Krueng Woyla dan anak-anak sungainya yaitu wilayah Kecamatan Sungai Mas, Woyla Timur, Woyla Barat, Arongan Lambalek dan Samatiga. Krueng Meureubo dan anak-anak sungainya, yaitu dari Kecamatan Pante Ceuremen, Kaway XVI, Meureubo dan Johan Pahlawan, di mana pertemuan Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peuto adalah di Kecamatan Lhok Bubon. Serta Krueng Bubon, yaitu pada Kecamatan Bubon dan Samatiga.

Dari sejumlah sungai di atas, yang paling luas cakupan masalah banjirnya adalah Krueng Woyla dan Meureubo. Khususnya Krueng Meureubo area banjirnya terdapat simpul perkotaan Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat. Selain kawasan perkotaan Meulaboh (Kecamatan Johan Pahlawan), wilayah Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI. Sementara Krueng Woyla cakupan banjir yang sering melanda wilayah hilir sungai yaitu Kecamatan Arongan Lambalek dan sebagian Kecamatan Samatiga.



Gambar 4. Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Februari setiap tahunnya. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada Oktober mencapai 97,9 mm. Rata – rata curah hujan di Kabupaten Aceh

Barat 255,1 mm. Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 – 31,2 oC pada siang hari dan 23 - 25 oC pada malam hari. Sedangkan rata - rata lamanya penyinaran matahari minimum terjadi di bulan Agustus sekitar 20 persen, dan penyinaran maksimum yaitu di bulan Februari sebesar 58 persen. Sedangkan tekanan serta kelembaban udara rata- rata setiap bulannya mencapai 1.010,1 atm atau 86 persen.

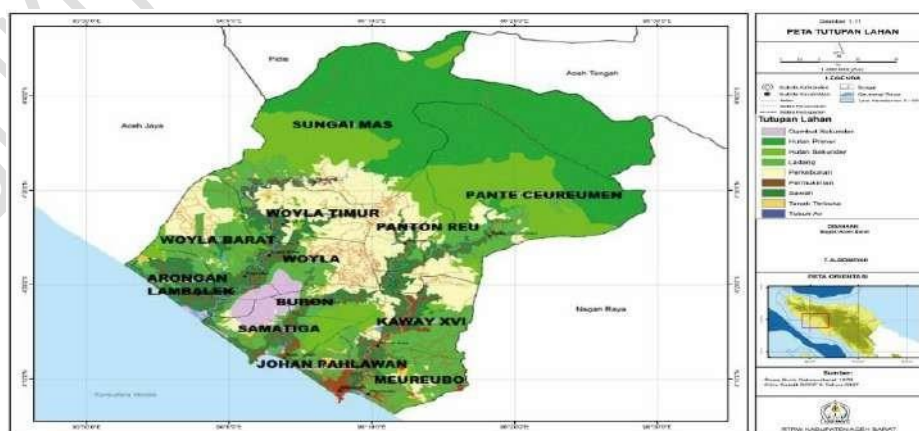


Gambar 5. Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

1.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat umumnya untuk keperluan areal perkampungan/pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan primer yaitu mencapai luas 115.235.90 Ha atau 39,36 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 51.014,20 Ha atau 17,42 persen.



Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Tabel 2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat

Uraian	Luas(Ha)	Persentase Luas
Kawasan Lindung		
Kawasan Hutan Lindung	102.558,47	37,10
Kawasan Sempadan Pantai	391,98	13,39
Kawasan Sempadan Sungai (termasuk sungai)	4.529,31	1,64
Kawasan Sekitar Geunang (termasuk Geunang dan Rawa)	371.84	12,70
Kawasan Pantai Berhutan Bakau	372,96	0,13
Kawasan Cagar Budaya Makam Teuku Umar	500,06	17,08
Kawasan Rawan Bencana*	-	-
Sub Jumlah	108.724,61	39,33
Kawasan Budidaya		
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	4.586,97	1,66
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	21.563,95	7,80
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	12.713,87	20,18
Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar	55.778,34	20,18
Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat	60.912,21	22,04
Kawasan Pertambangan**	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	177,64	0,06
Kawasan Peruntukan Pariwisata	149,93	0,05
Kawasan Peruntukan Pendidikan	85,53	0,03
Kawasan Peruntukan Militer	20,81	0,01
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	5.885,98	2,13
Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	4.117,41	0,14
Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau	388,81	0,14
Sub Jumlah	167.685,13	60,67
Jumlah	276.409,74	100,00
Luas Menurut UU Nomor 4 Tahun 2002 (Km2)	2.927,95	-

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya di pantai barat-selatan khususnya Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1.	Kawasan Lindung	Gunung Leuser	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
2.	Kawasan Lindung wilayah Sungai	Wilayah sungai Woyla – Batee	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya alam	Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

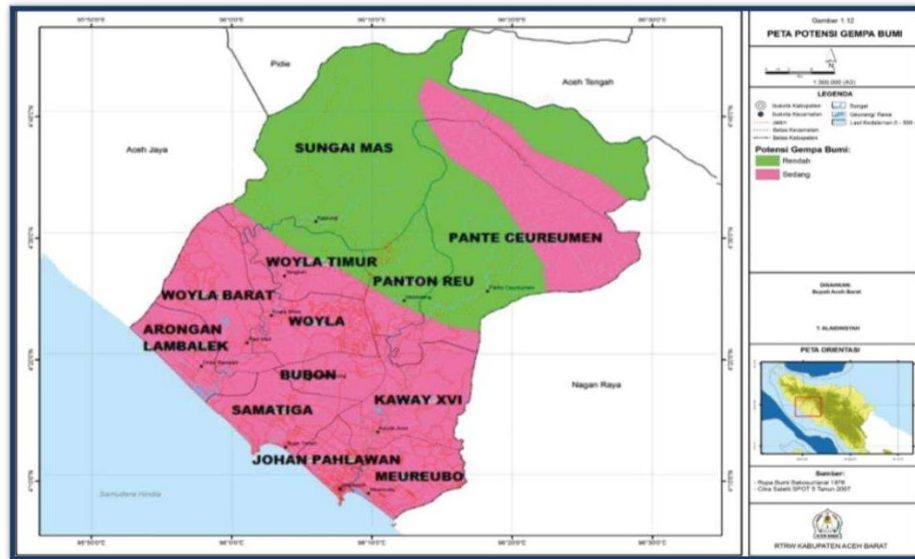
Tabel 4. Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1.	Kawasan Andalan	Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
2.	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	Kepentingan Lingkungan Hidup Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

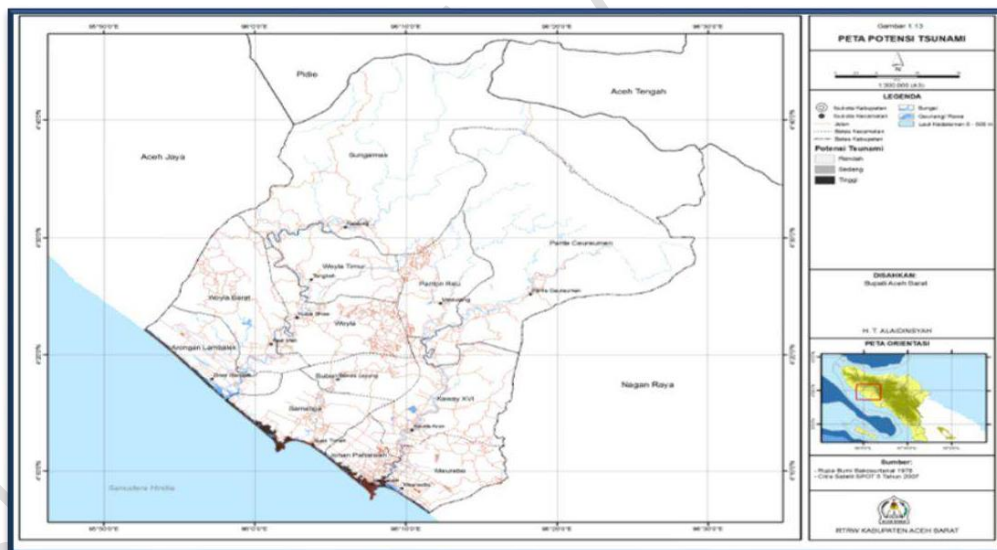
1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi kebencanaan geologi berupa gempa bumi, yang merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tinggi dengan daerah lain di sepanjang Patahan Semangko yang membentang di seluruh wilayah pantai barat Aceh. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat meliputi: Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.



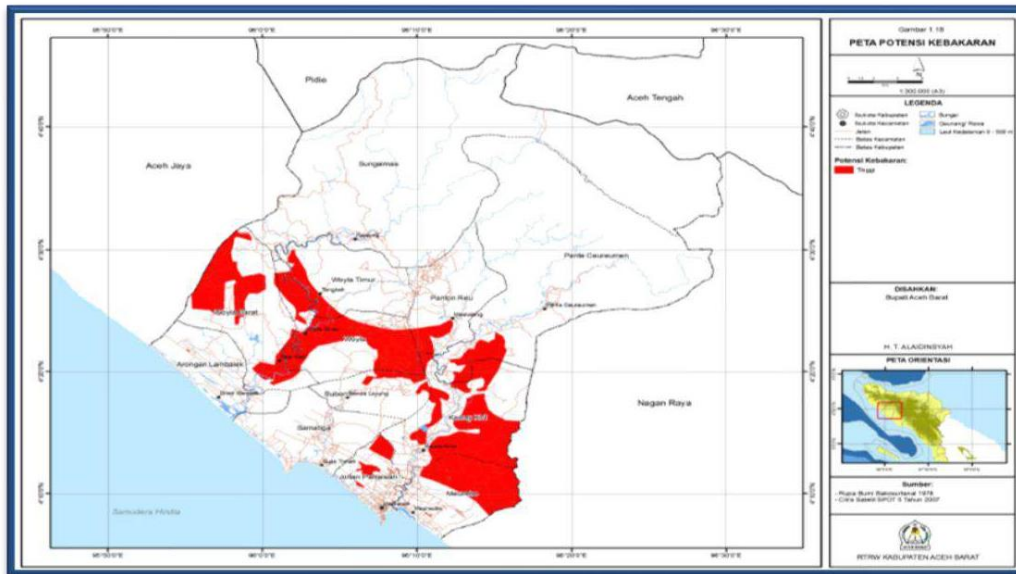
Gambar 7. Peta Bahaya Gempa Kabupaten Aceh Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai barat yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki resiko dampak parah yaitu pada perkotaan Meulaboh.



Gambar 8. Peta Potensi Tsunami Kabupaten Aceh Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

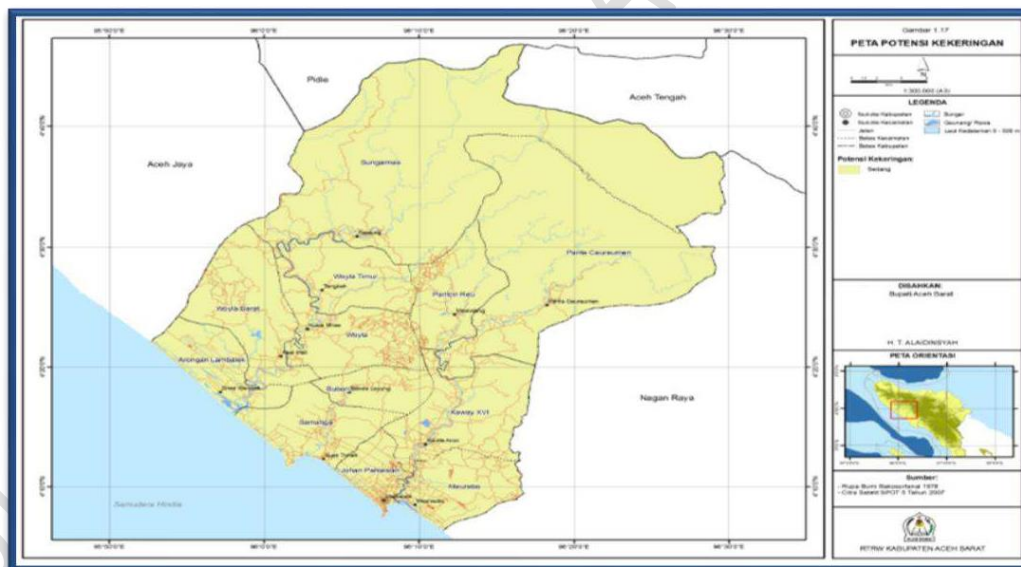
Potensi bencana kebakaran; berupa kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Samatiga, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Bubon.



Gambar 9. Peta Potensi Kebakaran Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Potensi kekeringan ini berada di Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan, Samatiga dan sebagian Arongan Lambalek.



Gambar 10. Peta Potensi Kekeringan Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Potensi bencana longsor; Daerah yang diprediksi masih akan mengalami ancaman bencana longsor adalah Kecamatan Pantai Ceuremen dan Kecamatan Sungai Mas. Potensi puting beliung; daerah yang diprediksikan memiliki potensi puting beliung adalah Kecamatan Pantai Ceuremen, Kecamatan Sungai Mas dan sebagian Kecamatan Pantan Reu.

Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut) di sekitar perkotaan Meulaboh dan banjir bandang di wilayah DAS Krueng Meureubo. Potensi abrasi dan erosi di Kabupaten Aceh Barat berada pada Kecamatan Johan Pahlawan. Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh dibawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global.

1.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih antisipatif.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas dapat ditetapkan isu-isu strategis Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, yakni:

A. Penanggulangan daerah bermasalah kesehatan

Isu strategis penanggulangan daerah bermasalah kesehatan difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan serta menambah ketersediaan tenaga dokter dan pendistribusian tenaga kesehatan di kecamatan, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta penurunan kasus gizi buruk.

B. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau

Isu strategis pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan mutu dan akses pendidikan yang komprehensif dan sistematis, termasuk di dalamnya optimalisasi mutu pendidikan, pemerataan distribusi guru di daerah perkotaan maupun pedesaan, penyediaan guru menurut bidang studi, peningkatan pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dayah, serta peningkatan kompetensi guru.

C. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Isu strategis peningkatan kualitas sumberdaya manusia difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, honorer, dan teungku dayah sesuai dengan kemampuan daerah dengan harapan akan meningkatkan kinerja dan menghindari praktek KKN dalam pemerintahan serta pemberian beasiswa S1, S2 maupun S3 sehingga kualitas PNS dan Non PNS semakin baik.

D. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Isu strategis pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan OPD sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat.

Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah dengan berbagai optimalisasi dibidang pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seperti pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender, upaya pengendalian masalah kependudukan dan optimalisasi peran TJSLP dalam pembangunan.

E. Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana

Isu strategis pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar (irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman) dan perbaikan konektivitas antar wilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Penerapan pembangunan infrastruktur juga melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dapat menurunkan dampak risiko bencana dan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan mengacu kepada KLHS.

F. Percepatan penanggulangan kemiskinan

Isu strategis percepatan penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK), Pemenuhan beras Rastra, Subsidi Listrik, pemberian beasiswa untuk siswa dan santri, pembangunan sarana dan prasarana dasar masyarakat, peningkatan program PKH, dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat serta mendorong lembaga TP2KD dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

G. Percepatan pertumbuhan ekonomi

Isu strategis percepatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penguatan bidang pertanian, perikanan, industri, dan koperasi dan UMKM, serta pariwisata difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang akan memberi manfaat dalam rangka membangun pertanian dan ekonomi maritim, serta mengelola rantai pasok (supply chain management) di seluruh sektor produksi. Meningkatkan nilai tambah (value added), mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan sumber daya daerah dan memproteksi produk-produk yang dihasilkan, serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor-impor, meningkatkan pariwisata Islami dengan membangun sarana dan prasarana dalam menaikkan jumlah kunjungan wisata domestik dan manca negara yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemantapan penerapan nilai-nilai syariat islam dalam kehidupan masyarakat Isu strategis pemantapan penerapan nilai-nilai syariat islam dalam kehidupan masyarakat difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat islam dan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarkan nilai-nilai ke-Islaman dengan cara penegakan Qanun Syariat Islam, optimalisasi semangat beragama di dalam masyarakat, peningkatan tenaga keagamaan dalam mengembangkan tugas syariat islam dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan keagamaan.

H. Optimalisasi pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh

Isu strategis Optimalisasi pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh difokuskan untuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Menuntaskan aturan turunan UUPA untuk diimplementasikan dalam pembangunan dan

kehidupan masyarakat. Di samping itu, peningkatan semangat nasionalisme dalam masyarakat dan pemberdayaan mantan kombatan dalam bidang ideologi, sosial dan ekonomi.

I. Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat

Isu strategis pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat difokuskan untuk memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya ke Aceh yang islami dan pluralistik dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan MAA baik di kabupaten, kecamatan dan gampong untuk memperkuat budaya dan adat istiadat Islami.

J. Optimalisasi upaya ketahanan pangan

Isu strategis optimalisasi upaya ketahanan pangan difokuskan melalui pemanfaatan lahan perkarangan dan diversifikasi pangan serta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat secara mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain, serta memotong rantai distribusi pangan.

K. Pandemi Covid-19

Virus corona disease-19 (Covid-19) mulai mewabah didunia sekitar bulan November 2019 atau sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan, China. Sejak itu, penyebaran Covid-19 terus terjadi diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kasus pertama di Indonesia yang diumumkan secara resmi terjadi pada Tanggal 2 Maret 2020, dimana 3 orang yang berasal dari satu keluarga dinyatakan positif terjangkit virus Covid-19. Sejak itu, pemerintah pusat mulai menyiapkan Langkah dan upaya dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kabupaten Aceh Barat menindaklanjuti dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 333 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Aceh Barat.

Kasus pertama terkonfirmasi positif di Kabupaten Aceh Barat pada Bulan Juni Tahun 2020. Sejak itu, Pemerintah Kabupaten Aceh terus meningkatkan upaya penanganan penyebaran covid-19 melibatkan Forkopimda untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan (Penggunaan masker,

Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Keramaian). Selain itu, Penanganan penyebaran Covid-19 juga dilaksanakan dengan mendirikan pos perbatasan untuk deteksi dini pendatang dari luar Kabupaten Aceh Barat.

1.3. Analisis Daya Saing Daerah

Menunjukkan kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah agar mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

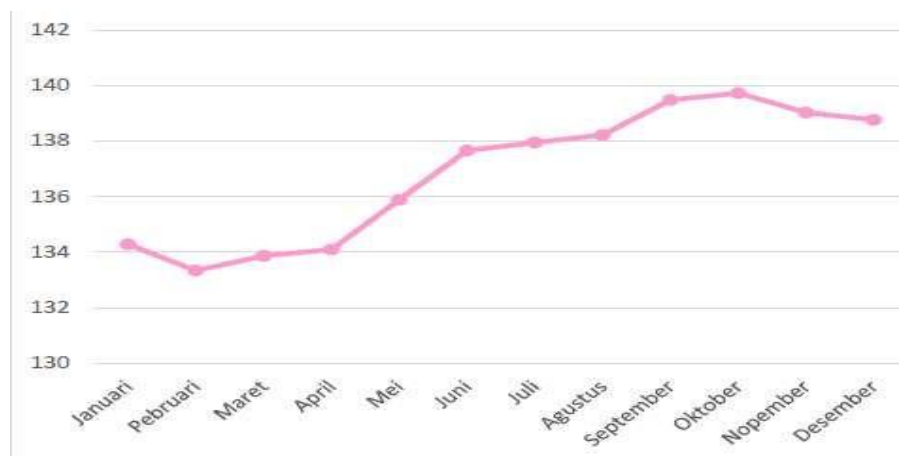
A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Realisasi pendapatan daerah Aceh Barat pada tahun 2019 dapat terealisasi sebesar 1.360,08 milyar rupiah, sebagian besar (60 persen) berasal dari dana perimbangan berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. Sedangkan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri sangatlah kecil (8 persen). Sisanya sebesar 32 persen lagi berasal dari Pendapatan Sah Lainnya.

Anggaran tersebut diatas akan dialokasikan untuk membiayai belanja daerah. Realisasi belanja Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2019 mencapai 1.299,12 milyar rupiah. Belanja ini sebagian besar (37,92 persen) dialokasikan untuk belanja pegawai baik belanja langsung maupun tidak langsung. Belanja Modal yang dianggarkan selama tahun tersebut mencapai 254,86 milyar rupiah, sedangkan belanja bantuan keuangan kepada desa pada tahun yang sama sebesar 311,98 milyar rupiah.



Gambar 11. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019
Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020



Gambar 12. Indeks Harga Konsumen per Bulan di Kabupaten Aceh Barat (2012=100), 2019
Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020

B. Fokus Iklim Berinvestasi

Angka tindak kriminal di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pada tahun 2019. Data dari Polres Aceh Barat mencatat sebanyak 83 kasus pada tahun 2019 atau turun sebanyak 2 kasus dari tahun 2018. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 141 kasus. Kasus di tahun 2019 tersebut berupa pencurian kendaraan bermotor, penipuan, pengrusakan, penganiayaan, pencurian biasa, pembakaran, pencabulan, pemalsuan surat, KDRT dan lain-lain.

Tabel 5. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015–2019

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	64	58	38	27	21
Samatiga	20	22	12	21	14
Bubon	-	7	4	3	1
Arongan Lambalek	3	4	2	4	5
Woyla	8	7	-	2	3
Woyla Barat	2	2	-	2	8
Woyla Timur	1	-	-	-	1
Kaway XVI	11	14	24	12	13
Meureubo	18	16	21	10	14
Pante Ceureumen	3	6	6	2	1
Panton Reu	-	5	-	-	-
Sungai Mas	1	-	-	2	2

Sumber: Kabupaten Aceh Bara Dalam Angka, 2020.

Tabel 6. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015-2019

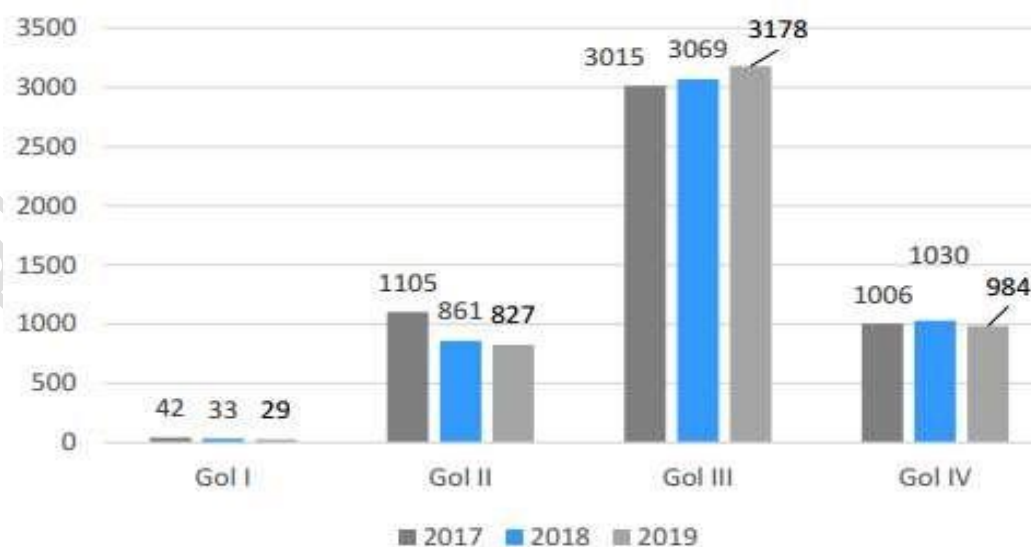
Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	*)	59	43	27	95
Samatiga	*)	59	50	21	90
Bubon	*)	86	100	3	100
Arongan Lambalek	*)	100	-	4	60
Woyla	*)	100	33	2	100
Woyla Barat	*)	50	-	2	95
Woyla Timur	*)	-	-	-	100
Kaway XVI	*)	71	33	12	61
Meureubo	*)	62	33	10	85
Pante Ceureumen	*)	67	33	2	100
Panton Reu	*)	-	-	-	-
Sungai Mas	*)	-	-	2	-

Sumber: Kabupaten Aceh Bara Dalam Angka, 2020

*) : data tidak tersedia

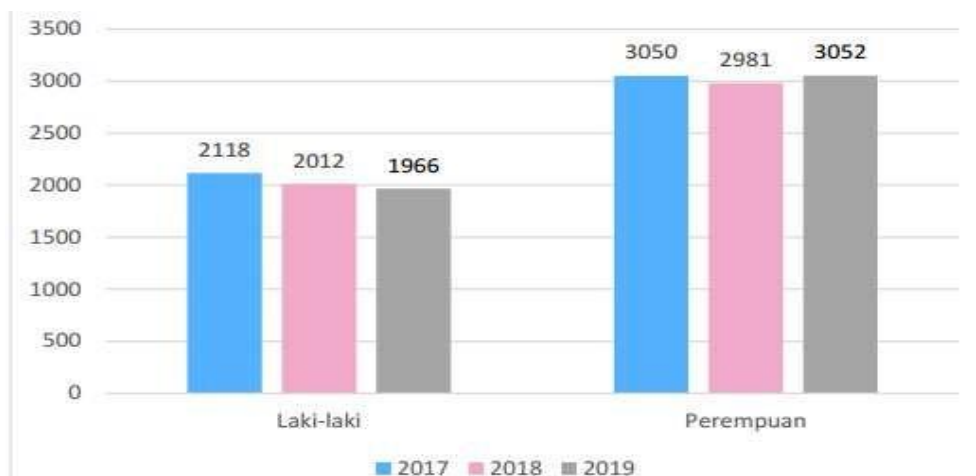
C. Fokus Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2018 jajaran pemerintah daerah terdiri dari 28 dinas/badan, 22 kantor/ inspektorat/ seketariat dan 33 UPTD. Total seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah kondisi 31 Desember 2019 berjumlah 5018 orang, Sebesar 3.178 orang diantaranya adalah golongan III, sebanyak 984 orang diantaranya merupakan golongan IV, PNS dengan golongan II tercatat 827 orang, sisanya adalah PNS bergolongan I.



Gambar 13. PNS Menurut Golongan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2019

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020



Gambar 14. PNS Menurut Jenis Kelamin dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2019
Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

Tabel 7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2018-2019

Golongan Kepangkatan	2018			2019		
	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	670	1.930	2.600	629	1.875	2.504
Fungsional Umum	913	893	1.812	910	856	1.767
Eselon II	25	2	27	30	3	33
Eselon III	134	25	159	134	33	167
Eselon IV	270	169	439	263	184	447
Jumlah	2.116	3.052	5.168	2.012	2.981	4.993

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

D. Fokus Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan besarnya investasi yang masuk dan banyaknya jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya di suatu daerah berikut serapan tenaga kerja lokal dan asing. Realisasi investasi di Kabupaten Aceh Barat menurut sektor baik dari PMDN dan PMA dalam kurun waktu tahun 2015-2019 digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Statistik Realisasi Investasi Menurut Sektor (PMA & PMDN) di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015-2019

Uraian PMA		2015		2016		2017		2018		2019	
		P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)
	Tanaman Pangan	-	-	-	-	1	0	1	31.017	1	2.391,30

Uraian PMA		2015		2016		2017		2018		2019	
		P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)	P	Investasi (US\$.Ribu)
Kab. Aceh Barat	dan Perkebunan										
	Pertambangan	2	3,2	1	27.246,70	1	0	1	0	-	-
	Listrik, Gas dan Air	3	289,8	1	4,7	6	660,1	5	207,1	4	30,9
	Perdagangan dan Reparasi	1	0	3	123	1	0	-	-	-	-
	Sub Total	6	293	5	27.374,40	9	660,1	7	31.224,10	5	2.422,20
Aceh	Sub Total	6	293	5	27.374,40	9	660,1	7	31.224,10	5	2.422,20
Total		6	293	5	27.374,40	9	660,1	7	31.224,10	5	2.422,20

Uraian PMDN		2015		2016		2017		2018		2019	
		P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)
Kab. Aceh Barat	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	14.152,20	1	12.638,60	1	2,25	2	15.719,20	3	38.047,40
	Pertambangan	8	934.270,30	3	261.358,40	2	33.175,20	2	126.700,30	2	72.251,50
	Industri Makanan	1	0	1	213.103	2	42.852	3	88.982,60	2	0
	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	2	13.644,90	1	4.615,60	-	-	1	5.076,70	1	3.010,90
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1	300	1	40	1	0	1	86	2	1.028,50
	Industri Lainnya	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	1	0	2	2.441,60	1	0
	Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	1	528,5	1	0	-	-
	Industri Kimia Dasar,	-	-	-	-	-	-	1	1,1	1	10.000

Uraian PMDN	2015		2016		2017		2018		2019	
	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)
Barang Kimia dan Farmasi										
Konstruksi	-	-	-	-	-	-	1	76	-	-
Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	1	1900	1	0
Sub Total	13	962.367,40	7	491.755,60	9	78.805,70	15	242.082,40	13	124.338,30
Aceh Sub Total	13	962.367,40	7	491.755,60	9	78.805,70	15	242.082,40	13	124.338,30
Total	13	962.367,40	7	491.755,60	9	78.805,70	15	242.082,40	13	124.338,30

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

P: Proyek.

2. Analisis Kesiapan Daerah

2.1. Struktur

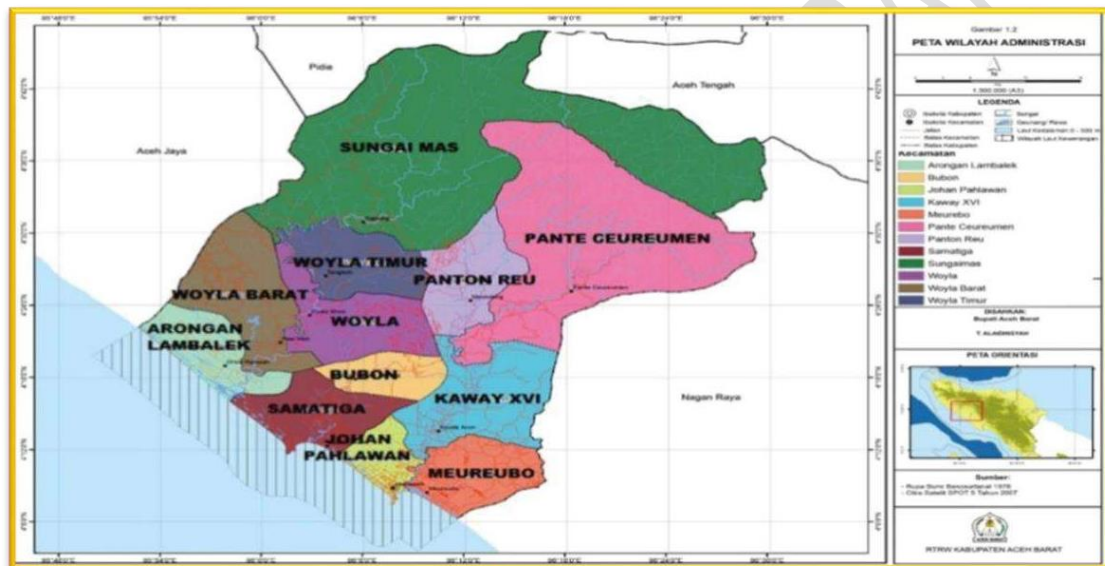
Tujuan utama analisis struktur daerah adalah untuk memahami kondisi nyata serta faktor-faktor yang menjadi penggerak proses pembangunan suatu daerah. Terdapat tiga fokus utama dalam analisis struktur daerah, yakni analisis: sumber daya manusia, kapasitas keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah. Analisis sumber daya manusia mencakup penduduk, tenaga kerja, dan kemampuan mereka. Analisis sumber daya manusia melibatkan penilaian terhadap jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keterampilan, tingkat pengangguran, dan distribusi tenaga kerja di dalam daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dengan baik menjadi aset penting dalam pembangunan daerah, karena mereka berperan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Analisis kapasitas keuangan daerah bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Komponen ini mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan manajemen keuangan daerah. Analisis kapasitas keuangan daerah melibatkan penilaian terhadap penerimaan pajak dan non-pajak, sumber pendanaan lainnya, efisiensi pengeluaran, kebijakan fiskal, dan keberlanjutan keuangan daerah.

Sedangkan, analisis sumber daya pemerintah daerah melibatkan kapasitas institusi, kebijakan publik, dan mekanisme pemerintahan. Analisis sumber daya pemerintah daerah mencakup evaluasi terhadap struktur pemerintahan, kelembagaan, proses pengambilan keputusan, kapasitas manajerial, dan kualitas pelayanan publik. Sumber daya pemerintah yang kuat dan efektif penting untuk mengelola dan mengkoordinasikan pembangunan daerah, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan menjaga stabilitas serta keamanan dalam daerah.

Dengan melakukan analisis terhadap ketiga komponen tersebut, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan sebuah daerah dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Informasi yang dihasilkan dari analisis struktur daerah dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang, jika dilihat dari letak geografis. Kabupaten Aceh Barat di bagian utara berbatasan dengan Aceh Jaya, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Sementara itu, di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Nagan Raya. Sedangkan, di bagian timur berbatasan dengan Aceh Tengah dan Nagan Raya. Terakhir di bagian barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Aceh Jaya. Gambar 15 memperlihatkan peta rinci mengenai sebaran wilayah Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 15. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat

2.1.1. Sumber Daya Manusia

2.1.1.1. Jumlah Penduduk

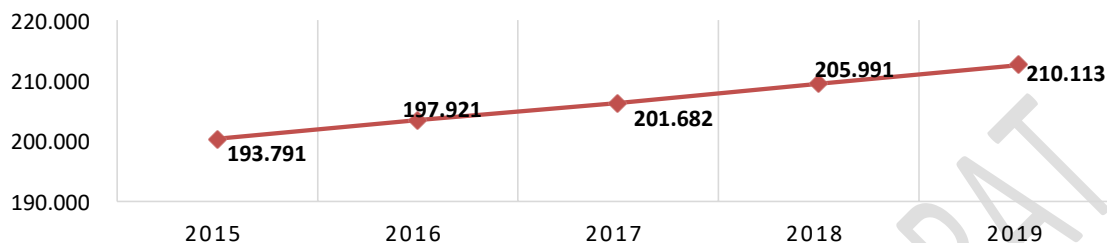
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Jiwa)

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2015	98.001	95.790	193.791
2016	100.336	97.585	197.921
2017	102.099	99.583	201.682

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2018	104.524	101.467	205.991
2019	106.478	103.635	210.113

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.



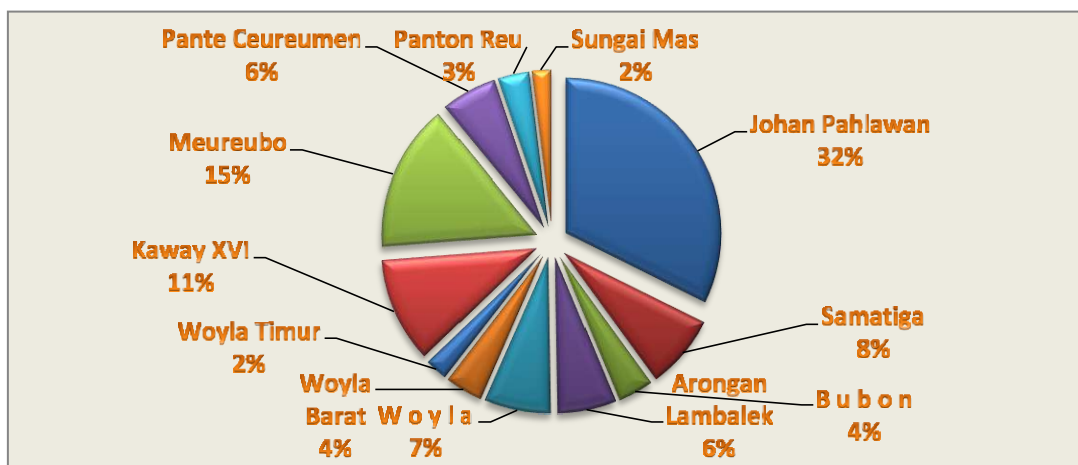
Gambar 16. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d 2019 (Jiwa)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Jika ditinjau dari segi penyebarannya, penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 masih terkonsentrasi di Kecamatan Johan Pahlawan yakni sebesar 67.954 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI masing-masing sebesar 32.122 dan 22.977 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Jumlah (jiwa)
		Laki - laki	Perempuan	
1.	Johan Pahlawan	34.441	33.513	67.957
2.	Samatiga	8.080	8.023	16.103
3.	B u b o n	3.907	3.879	7.786
4.	Arongan Lambalek	6.485	6.173	12.658
5.	W o y l a	7.229	7.170	14.399
6.	Woyla Barat	4.129	4.095	8.224
7.	Woyla Timur	2.481	2.439	4.920
8.	Kaway XVI	11.641	11.336	22.977
9.	Meureubo	16.421	15.701	32.122
10.	Pante Ceureumen	6.222	5.965	12.187
11.	Panton Reu	3.408	3.352	6.760
12.	Sungai Mas	2.023	1.989	4.023
Jumlah	2019	106.478	103.635	210.113
	2018	104, 504	101 467	205 971
	2017	102.099	99.583	201.682
	2016	100.336	97.585	197.921
	2015	98.001	95.790	193.791

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.



Gambar 17. Sebaran Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Pada piramida penduduk diatas tergambar bahwa distribusi di tiap kelompok umur pada penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Terkecuali pada kelompok umur 65+ dan umur 30-34 tahun, dimana jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur ini lebih mengecil. Ini disebabkan banyak diantara mereka yang bermigrasi keluar daerah Aceh Barat. Jumlah penduduk pertengahan tahun Aceh Barat hasil estimasi tahun 2019 mencapai 210.113 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01 persen. Pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh tingginya arus migrasi masuk ke Aceh Barat terutama ke daerah perkotaan.

2.1.1.2. Komposisi Penduduk

Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2015-2019 terus bertambah, pada tahun 2015 jumlah rumah tangga sebanyak 47.225 dan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 4.847 menjadi 52.072 kepala keluarga dengan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan (sex ratio) pada tahun 2019 sebesar 102.74. Dari tabel terlihat jumlah rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 17.093 KK, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sungai Mas dengan jumlah rumah tangga hanya 1.023 KK.

Tabel 11. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki – laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Johan Pahlawan	17.093	34.441	33.513	67.954	102,77
2.	Samatiga	4.440	8.080	8.023	16.103	100,71
3.	Bubon	1.870	3.907	3.879	7.786	100,72
4.	Arongan Lambalek	3.340	6.485	6.173	12.658	105,05
5.	Woyla	3.781	7.229	7.170	14.399	100,82

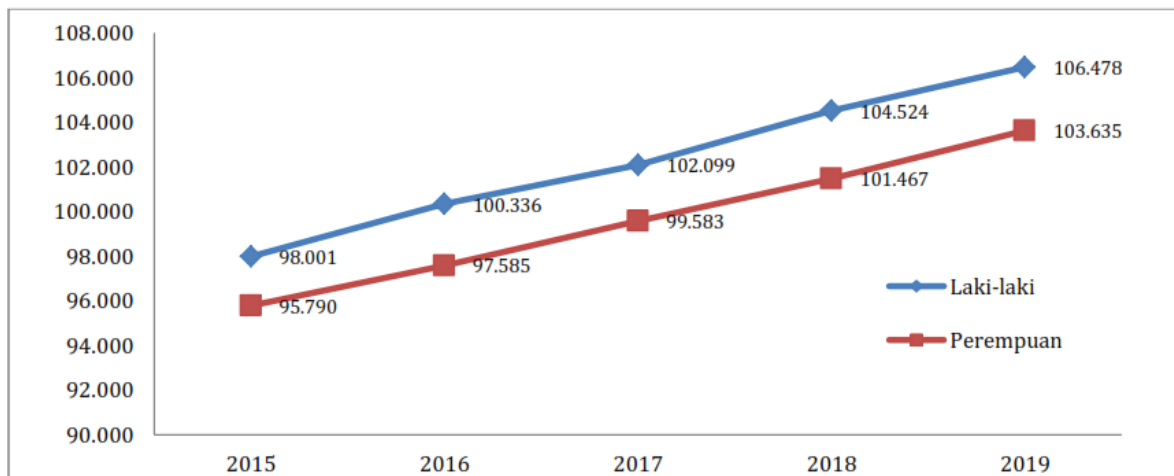
No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki – laki	Perempuan	Jumlah	
6.	Woyla Barat	2.226	4.129	4.095	8.224	100,83
7.	Woyla Timur	1.305	2.481	2.439	4.920	101,72
8.	Kaway XVI	5.436	11.641	11.336	22.977	102,69
9.	Meureubo	7.621	16.421	15.701	32.122	104,59
10.	Pante Ceureumen	2.213	6.222	5.965	12.187	104,31
11.	Panton Reu	1.724	3.408	3.352	6.760	101,67
12.	Sungai Mas	1.023	2.034	1.989	4.023	102,26
Jumlah	2019	52.072	106.478	103.635	210.113	102,74
	2018	49.983	102.099	99.583	201.682	102,53
	2017	49.050	108.336	97.585	205.921	103
	2016	48.027	98.001	95.790	193.791	102
	2015	47.225	96.528	93.716	190.244	103

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Tabel 12. Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015-2019 (Persen)

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Johan Pahlawan	102,38	103	103	103	102,77
2.	Samatiga	101,37	101	100	101	100,71
3.	B u b o n	100,28	101	101	101	100,72
4.	Arongan Lambalek	104,58	105	105	105	105,05
5.	W o y l a	100,11	101	101	101	100,82
6.	Woyla Barat	101,46	101	101	101	100,83
7.	Woyla Timur	100,22	102	101	102	101,72
8.	Kaway XVI	102,26	103	102	103	102,69
9.	Meureubo	103,58	105	104	105	104,59
10.	Pante Ceureumen	103,83	104	104	105	104,31
11.	Panton Reu	101,16	102	101	102	101,67
12.	Sungai Mas	101,68	102	102	103	102,26
Jumlah		103	103	103	103	102,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.



Gambar 18. Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat, Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

2.1.1.3. Struktur Usia

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Barat berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2015-2019 masih didominasi oleh kelompok berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Aceh Barat masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu sejumlah 142.594 jiwa atau 67,52 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berusia 15 – 64 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015-2019 (Jiwa)

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan		
1.	0-4	10.466	10.307	20 773	
2.	5-9	9 726	9 624	19 350	
3.	10-14	9 521	9.118	18 639	
4.	15-19	8.861	8 558	17 419	
5.	20-24	8 792	8 912	17 704	
6.	25-29	9 773	9 518	19 291	
7.	30-34	9 424	9.610	19.034	
8.	35-39	8.941	8.943	17 884	
9.	40-44	7 816	7 451	15.267	
10.	45-49	6 864	6.028	12 892	
11.	50-54	5 252	4 777	10.029	
12.	55-59	3 849	3 583	7 137	
13.	60-64	3.035	2.902	5.937	
14.	65+	4.158	4.304	8.462	
Jumlah		2019	106.478	103.635	210.113
		2018	104, 504	101 467	205 971
		2017	102.099	99.583	201.682

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Jumlah
		Laki-laki		Perempuan	
		2016	100.336	97.585	
		2015	98.001	95.790	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020

Dengan jumlah usia produktif yang terus meningkat, perlu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten dalam mengantisipasi gejolak, dapat berupa penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan dan pelatihan, sehingga keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja.

Tabel 14. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Jiwa)

No.	Kecamatan	Kelompok Usia Sekolah						Jumlah	
		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun		LK	PR
		LK	PR	LK	PR	LK	PR		
1.	Johan Pahlawan	3.550	3.525	1.838	1.742	2.129	1.815	7.517	7.082
2.	Samatiga	679	679	374	323	367	413	1.420	1.415
3.	B u b o n	479	402	213	206	171	195	863	803
4.	Arongan Lambalek	747	657	348	346	296	313	1.391	1.316
5.	Woyla	802	814	401	433	378	354	1.581	1.601
6.	Woyla Barat	407	444	219	231	216	200	915	875
7.	Woyla Timur	308	280	127	143	87	129	522	552
8.	Kaway XVI	1.301	1.267	572	536	686	620	2.559	2.423
9.	Meureubo	1.875	1.815	979	875	773	805	3.627	3.495
10.	Pante Ceureumen	702	760	386	338	622	292	1.710	1.390
11.	Panton Reu	438	449	186	171	153	149	777	769
12.	Sungai Mas	264	215	70	84	72	67	406	366
Jumlah	2019	11.625	11.307	5.663	5.428	5.950	5.352	23.238	22.087
	2018	11.421	11.074	5.547	5.309	5.869	5.271	22.837	21.654
	2017	11.169	10.866	5.435	5.226	5.790	5.215	22.394	21.307
	2016	10.992	10.646	5.368	5.147	5.760	5.175	22.120	20.968
	2015	10.564	10.378	5.218	5.128	5.208	4.925	20.990	20.431

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk hampir berimbang antara laki- laki dan perempuan pada kelompok usia sekolah yang ada. Pada setiap kelompok usia sekolah SD, SMP dan SMA, jumlah laki-laki juga lebih banyak dari perempuan. Hal ini terkait dengan komposisi penduduk Kabupaten Aceh Barat yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

2.1.1.4. Jenis Pekerjaan

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus bertambah, hal ini menjadi pekerjaan berat untuk pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dapat dikendalikan. Dilihat dari table dibawah ini pada Tahun 2015 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 138.685 jiwa yang terdiri dari 50,59 persen berjenis kelamin laki-laki dan 49,41 persen perempuan, pada tahun 2019 jumlah tersebut bertambah menjadi 151.613 jiwa dengan komposisi 50,63 persen laki-laki dan 49,11 persen perempuan.

Tabel 15. Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015 – 2019 (Jiwa)

Tahun	Penduduk Usia Kerja		Jumlah (Lk+Pr)	Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
2015	70.163	68.522	138.685	50,59	49,41
2016	70.163	68.522	138.685	50,59	49,41
2017	73.550	71.614	145.164	50,67	49,33
2018	75.793	73.140	148.933	50,89	49,11
2019	76.759	74.854	151.613	50,63	49,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Barat menurut lapangan kerja utama yang tersedia dalam kurun waktu tahun 2015-2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini sebesar 39 (tiga puluh Sembilan) persen dan tahun 2019 sebesar 31 (tiga puluh satu) persen. Sektor selanjutnya yang menjadi pilihan adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa lainnya, Transportasi, pertambangan dan sektor yang paling kecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air serta sektor keuangan yang hanya sebesar 1 (satu) persen.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen)

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian	39	39	31	31	31
2.	Pertambangan	3	3	3	3	3
3.	Industri Pengolahan	27	27	29	28	28
4.	Listrik, Gas, dan Air	1	1	1	1	1
5.	Konstruksi	6	6	9	7	7
6.	Perdagangan	16	16	16	19	19
7.	Transportasi	3	3	3	4	4
8.	Keuangan	1	1	1	1	1
9.	Jasa Lainnya	4	4	7	6	6
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2016-2020.

Pada tahun 2015 sampai 2018 jumlah pencari kerja menurut tingkat atau klasifikasi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan SLTA, Sedangkan pada tahun 2019 didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan tingkat Sarjana/Pasca Sarjana (43,31 persen) dan SLTA (0,90 persen). Dari tabel terlihat bahwa pencari kerja yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 masih didominasi oleh kaum laki-laki. Secara rinci dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 17. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	SD dan tidak Tamat SD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	337	221	26	2	216	179	1025	882	4	-
3.	SLTA	4.203	1.808	410	228	3491	862	682	906	99	8
4.	DIPLOMA	1.602	1.215	16	80	875	599	11	22	16	39
5.	Sarjana/Pasca Sarjana	506	525	230	116	519	463	48	91	124	100
Jumlah		6.660	3.769	682	426	5.101	2.103	1.766	1.901	243	147

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2020

Sedangkan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Barat secara total mengalami penurunan pada periode 2017-2019. Pada tahun 2017, dari 100 persen penduduk usia 15 tahun keatas 60,34 persen diantaranya tergolong dalam angkatan kerja. Sepanjang tahun 2018, persentase angkatan kerja ini turun menjadi 54,58 persen.

Tabel 18. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

TAPK		Indikator Ketenagakerjaan									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas											
1.	Angkatan kerja	58.654	29.652	58.654	29.652	56.831	30.759	56.383	24.899	61.695	31.069
	Bekerja	55.760	26.571	55.760	26.571	53.953	28.209	52.274	21.962	57.201	28.654
	Pengangguran terbuka	2.894	3.081	2.894	3.081	2.878	2.550	4.109	2.937	4.494	2.415
2.	Bukan Angkatan Kerja	11.512	38.870	11.512	38.870	33.438	81.714	19.410	48.241	15.064	43.785
	Jumlah	70.166	68.522	70.166	68.522	90.269	11.243	75.793	73.140	76.759	74.854
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK)(%)	83,6	43,27	83,6	43,27	77,27	42,95	37,86	16,72	80,37	41,51

TAPK	Indikator Ketenagakerjaan									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)(%)									92,72	92,23
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	4,93	10,39	4,93	10,39	5,06	8,29	7,29	11,8	7,28	7,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

2.1.2. Sumber Daya Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat memiliki peran penting sebagai salah satu bingkai daerah di Provinsi Aceh. Sebagai salah satu pusat pemerintahan di bagian barat, Kabupaten Aceh Barat memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembangunan yang sejalan dengan tujuan pembangunan tingkat provinsi dan nasional, sambil tetap memperhatikan dan memahami peran serta posisi daerahnya. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan, dengan beberapa kecamatan yang memiliki jarak terdekat dari pusat kota Meulaboh. Tiga kecamatan yang paling dekat dengan Meulaboh adalah Meureubo, Samatiga, dan Kaway XVI. Kecamatan ini memiliki aksesibilitas yang lebih baik ke pusat kota dan fasilitas-fasilitas penting di Meulaboh.

Di sisi lain, terdapat juga beberapa kecamatan yang terletak lebih jauh dari pusat kota Meulaboh. Kecamatan terjauh dari Meulaboh antara lain Woyla Timur, Panton Reu, dan Sungai Mas. Kecamatan-kecamatan ini mungkin memiliki tantangan dalam hal aksesibilitas dan transportasi menuju pusat kota Meulaboh, namun demikian, mereka tetap menjadi bagian integral dari Kabupaten Aceh Barat.

Dalam hal pemukiman di Kabupaten Aceh Barat, dari total 322 gampong (desa), sebanyak 192 gampong berada di dataran, sementara 83 desa terletak di lereng. Perbedaan lokasi ini juga dapat mempengaruhi karakteristik geografis dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing wilayah. Desa-desa di dataran mungkin memiliki aksesibilitas yang lebih baik dan memiliki aktivitas yang lebih terkonsentrasi, sedangkan desa-desa di lereng mungkin memiliki tantangan topografi dan aksesibilitas yang lebih sulit.

Secara luas wilayah administratif, Kecamatan Kaway XVI dalam Kabupaten Aceh Barat memiliki jumlah daerah administrasi yang paling banyak. Kecamatan ini mencakup 44 gampong (desa) dan 132 dusun. Jumlah yang signifikan ini menunjukkan kompleksitas administrasi dan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kaway XVI.

Di sisi lain, Kecamatan Bubon adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki jumlah administrasi paling sedikit. Kecamatan ini terdiri dari 17 gampong (desa) dan 51 dusun. Tabel 2.1 menunjukkan sebaran jumlah kemukiman dan gampong per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 19. Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2022

Kecamatan	Gampong	Dusun
Johan Pahlawan	21	91
Samatiga	32	98
Bubon	17	51
Arongan Lambalek	27	81
Woyla	43	129
Woyla Barat	24	73
Woyla Timur	26	78
Kaway XVI	44	132
Meureubo	26	83
Pante Ceureumen	25	75
Panton Rheu	19	51
Sungai Mas	18	44
Aceh Barat	322	986

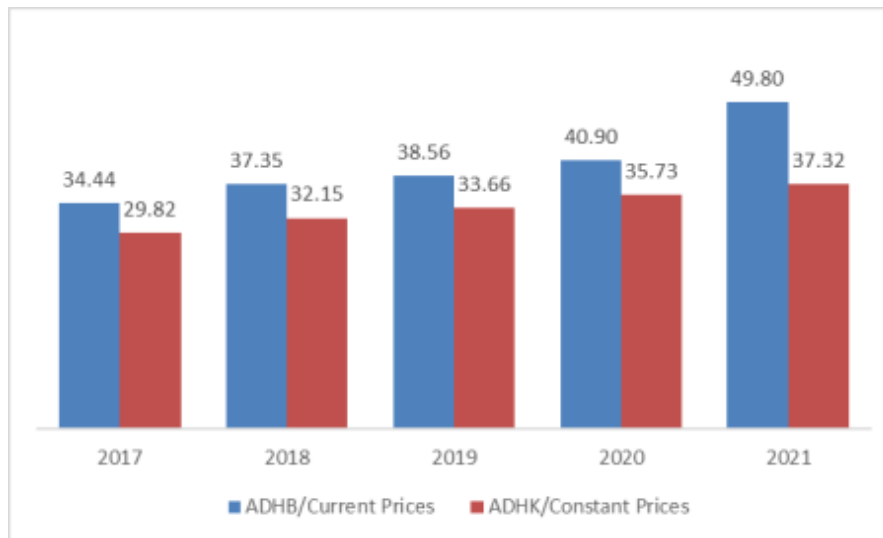
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2022.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per kapita di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, PDRB ADHB per kapita mencapai 34,44 juta rupiah, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 39,80 juta rupiah.

Dengan asumsi sebuah rumah tangga terdiri dari empat anggota (ayah, ibu, dan dua anak), kita dapat memperkirakan pendapatan rumah tangga dalam satu tahun. Dalam hal ini, dengan PDRB ADHB per kapita sebesar 39,80 juta rupiah pada tahun 2021, pendapatan rumah tangga diperkirakan mencapai 199,2 juta rupiah per tahun.

Jika kita membagi pendapatan tahunan tersebut dengan jumlah bulan dalam setahun, maka perkiraan pendapatan rumah tangga per bulan adalah sekitar 16 hingga 17 juta rupiah. Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah perkiraan kasar, dan pendapatan rumah tangga sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan, dan sumber pendapatan lainnya.

Peningkatan PDRB ADHB per kapita dan pendapatan rumah tangga yang terjadi selama lima tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan adanya potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambar 2.2 memperlihatkan peningkatan PDRB Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.



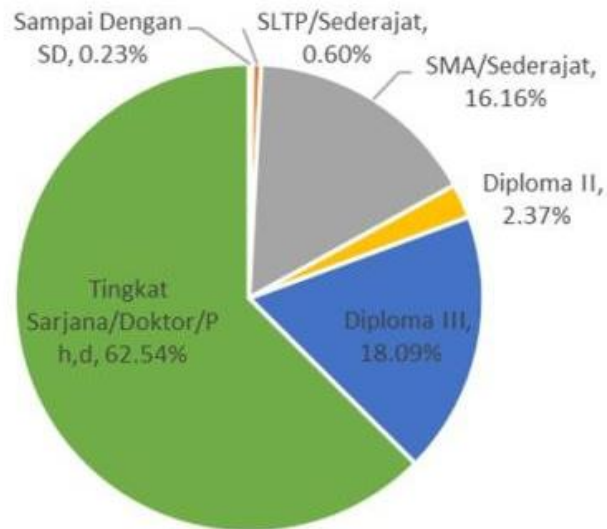
Gambar 19. Pendapatan per kapita Aceh Barat (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2022.

Apabila ditinjau dari aspek sumber daya pemerintahan, Pada tahun 2021 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 4.803 pegawai. ASN berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal komposisi pendidikan ASN di Aceh Barat, mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan DIV/sarjana/Doktor/Phd, yang mencakup 62,54 persen dari total pegawai. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi ini menunjukkan adanya penekanan pada peningkatan kualifikasi pendidikan dalam pengisian posisi ASN di Kabupaten Aceh Barat.

Selanjutnya, sebesar 20,54 persen pegawai memiliki pendidikan Diploma (I, II, dan III), yang juga menjadi kontributor penting dalam pemerintahan. Sementara itu, persentase pegawai dengan pendidikan SMA/ sederajat adalah 16,16 persen. Sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/ sederajat dan SD masing-masing hanya sebesar 0,60 persen dan 0,23 persen. Perlu dicatat bahwa komposisi pendidikan ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti DIV/sarjana/Doktor/Phd, dapat mencerminkan adanya upaya dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks.

Komposisi pendidikan ASN ini memiliki implikasi terhadap kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. Dengan adanya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang beragam, diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan menghadapi tantangan pembangunan yang beragam. Gambar 2.3 merupakan sebaran ASN Kabupaten Aceh Barat berdasarkan tingkat pendidikan.



Gambar 20. Persentase ASN di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2022.

Tabel 20. Gambaran distribusi rinci perbandingan jumlah ASN dan Tingkat Pendidikan ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022

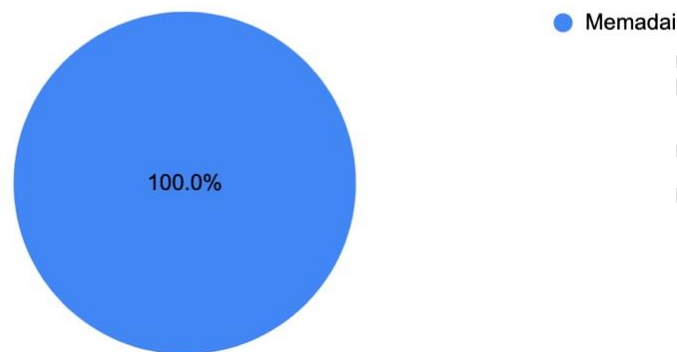
Pendidikan Terakhir	2021			2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Sekolah Dasar (SD)	8	2	10	5	2	7
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27	3	30	23	3	26
Sekolah Menengah Atas (SMA)	439	326	765	388	267	655
Diploma I/Akta I	5	5	10	1	4	5
Diploma II/Akta II	38	69	107	33	54	87
Diploma III/Akta III	139	725	864	175	690	865
Diploma IV/Akta IV	25	82	107	26	156	182
S1/Sarjana	1.015	1.677	2.692	1.058	1.766	2.824
S2/Pasca Sarjana	137	81	218	144	84	228
S3/Doktor/Ph.D	5	1	6	6	1	7
Jumlah Total	1.838	2.971	4.809	1.859	3.027	4.886

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2022.

Sejauh ini, berdasarkan hasil survei pemetaan penggunaan perangkat teknologi informasi (TI) di Kabupaten Aceh Barat diketahui bahwa: peralatan TI, seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta perangkat jaringan, merupakan alat yang penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pengelolaan data dan informasi di setiap Organisasi Perangkat

Daerah (OPD). Ketersediaan peralatan TI yang memadai di setiap OPD sangat penting untuk memastikan efisiensi dan produktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Dari hasil survei diketahui bahwa dari total 42 OPD didapatkan informasi bahwa seluruh peralatan komputer di setiap OPD di Kabupaten Aceh Barat telah memadai, dengan rincian 33.3% peralatan komputer di setiap OPD telah mutakhir, dan sebanyak 66.7% telah dilakukan pemutakhiran. Gambar 2.3 menunjukkan hasil survei kondisi terkini peralatan komputer di setiap OPD Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 21. Persentase Ketersediaan Peralatan Komputer di Kabupaten Aceh Barat
Sumber: Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2021

Pada sisi lainnya, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan penting bagi OPD untuk memiliki infrastruktur jaringan yang memadai. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Pemerintah Daerah, memungkinkan berbagi data, informasi, dan sumber daya di antara OPD. Ketersediaan infrastruktur jaringan intra yang memadai di setiap OPD sangat penting untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar pegawai di dalam satu OPD. Dengan memiliki jaringan komputer lokal yang terhubung, pegawai dapat berbagi informasi dan sumber daya dengan lebih efisien, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan produktivitas.

Ketika ada OPD yang belum memiliki jaringan komputer lokal yang menghubungkan antar komputer dalam satu OPD, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan infrastruktur jaringan dapat diambil. Hal ini dapat meliputi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, instalasi jaringan kabel, konfigurasi jaringan, dan penyediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola jaringan tersebut.

Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan diketahui bahwa, Terdapat 32 OPD belum memiliki jaringan komputer lokal yang menghubungkan antar komputer dalam suatu OPD. Berdasarkan hasil survei, juga diperoleh data bahwa: hanya 18,5% OPD yang memiliki koneksi LAN (Local Area Network) yang lancar. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam ketersediaan infrastruktur jaringan di sebagian besar OPD Kabupaten Aceh Barat.

Dalam situasi di mana sebagian besar OPD (81,5%) yang mengisi survei menyatakan memerlukan infrastruktur jaringan, pengembangan dan perbaikan infrastruktur jaringan

menjadi perlu. Tindakan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas koneksi jaringan di OPD yang membutuhkan.



Gambar 22. Persentase Ketersediaan Koneksi LAN Antar OPD di Kabupaten Aceh Barat
Sumber: Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2021

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk pengembangan dan perbaikan infrastruktur jaringan di OPD meliputi:

1. Evaluasi kebutuhan: Identifikasi kebutuhan infrastruktur jaringan di setiap OPD dengan mempertimbangkan jumlah pengguna, jenis aplikasi yang digunakan, volume data yang ditransfer, dan kebutuhan keamanan.
2. Perencanaan jaringan: Rencanakan desain jaringan yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan setiap OPD, termasuk penempatan perangkat keras (seperti router, switch, dan server) dan pemilihan teknologi jaringan yang tepat.
3. Pengadaan perangkat keras: Pastikan pengadaan perangkat keras jaringan yang diperlukan, seperti router, switch, kabel jaringan, dan perangkat jaringan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan standar yang relevan.
4. Konfigurasi jaringan: Lakukan konfigurasi jaringan dengan benar untuk memastikan koneksi yang lancar, keamanan yang memadai, dan manajemen jaringan yang efisien.
5. Peningkatan kecepatan dan kapasitas: Evaluasi kecepatan dan kapasitas jaringan yang ada dan lakukan peningkatan jika diperlukan untuk memenuhi tuntutan penggunaan data yang lebih tinggi.
6. Pelatihan dan pemeliharaan: Berikan pelatihan kepada staf OPD terkait manajemen jaringan, pemeliharaan perangkat, dan penyelesaian masalah jaringan. Pastikan juga adanya prosedur pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja jaringan yang optimal.

Dengan melakukan pengembangan dan perbaikan infrastruktur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan OPD, diharapkan konektivitas dan kualitas jaringan akan meningkat. Ini akan membantu OPD dalam melakukan tugas-tugas pemerintah dengan lebih efisien, berbagi

data dan informasi secara efektif, serta meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan infrastruktur jaringan dan pengembangan sistem informasi dalam rangka mendukung administrasi pemerintahan yang lebih efisien. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terhubung dengan internet, meskipun belum semua perangkat komputer terhubung dengan jaringan internet tersebut.

Dalam rangka memperbaiki masalah koneksi antar OPD, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil keputusan untuk menyewa jaringan Fiber Optik (FO) yang dimiliki oleh PT Telkom. Sebagai tindak lanjut, Diskominsa (Dinas Komunikasi dan Informatika) telah mengirimkan surat permintaan kepada General Manager Witel Aceh pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan nomor 555/392/VIII/2020.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang melakukan pendataan terhadap SDM yang tersedia. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi SDM yang memiliki kompetensi dalam sistem informasi serta yang dapat berperan sebagai pengguna sistem informasi atau sebagai tenaga ahli yang dapat membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi di OPD.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga sedang mempertimbangkan pendirian Network Operation Center (NOC). NOC adalah pusat pengawasan dan pemantauan jaringan komunikasi yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kinerja jaringan. Dengan adanya NOC, administrator dapat melakukan pengawasan dan pemantauan jaringan komunikasi secara efektif serta merespon masalah yang muncul dengan cepat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga fokus pada integrasi layanan sistem penghubung. Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menggunakan tiga aplikasi utama pemerintahan yakni: Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Pengawasan (SIPD, SIMDA, SIMHP), tetapi belum terintegrasi. Untuk itu, Kabupaten Aceh Barat akan melakukan survei meta data infrastruktur yang ada serta melakukan pemetaan atas jenis layanan dan aplikasi yang dapat diintegrasikan dalam mendukung administrasi pemerintahan. Integrasi ini akan memudahkan pertukaran data dan informasi antar layanan serta mengurangi ketergantungan pada proses manual.

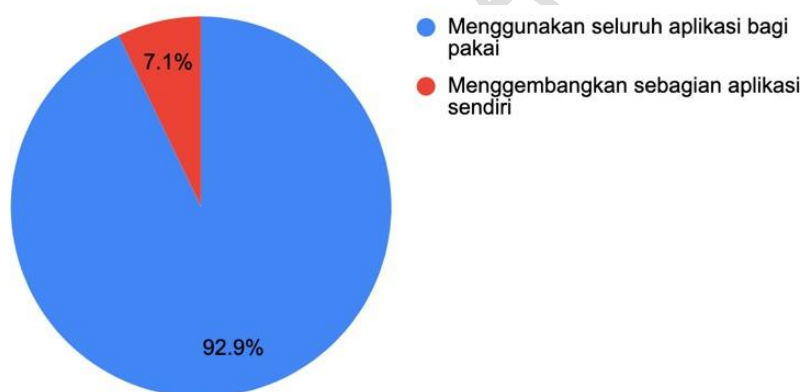
Dengan langkah-langkah yang dilakukan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem informasi dan komunikasi pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan layanan publik, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan kemajuan administrasi pemerintahan secara keseluruhan.

Di lain sisi, berdasarkan data hasil survei diketahui bahwa pengelolaan data dan informasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat sebagian besar masih dilakukan di masing-

masing komputer di setiap OPD. Dengan rincian: 90.5% dikelola pada masing-masing komputer OPD, 7.1% dikelola di komputer server OPD, dan 2.5% dikelola pada data center Diskominfo.

Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada OPD di Kabupaten Aceh Barat, ditemukan bahwa hampir seluruh OPD menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasinya. Aplikasi umum merujuk pada perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan secara umum oleh OPD Kabupaten Aceh Barat yakni aplikasi yang meliputi: aplikasi perkantoran, seperti *Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)*, aplikasi email, browser web, dan sebagainya. Aplikasi umum ini digunakan dalam mendukung tugas-tugas sehari-hari di OPD seperti pengolahan dokumen, komunikasi, dan pencarian informasi.

Sementara itu, aplikasi khusus merujuk pada perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu dalam suatu bidang atau sektor tertentu yang dikelola oleh setiap OPD Kabupaten Aceh Barat. Sejauh ini, penggunaan aplikasi khusus terdiri atas: (1) aplikasi bagi-pakai, yang digunakan oleh 92.9% OPD Kabupaten Aceh Barat dan (2) aplikasi yang dikembangkan sendiri, yang digunakan oleh 7.1% OPD Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 23. Persentase Ketersediaan Pengembangan Aplikasi di OPD Kabupaten Aceh Barat
Sumber: Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2021

Berdasarkan pada paparan hasil pemetaan kondisi infrastruktur pemerintahan Kabupaten Aceh Barat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Aceh Barat telah memiliki infrastruktur pemerintahan yang memadai dalam rangka mendukung terlaksananya proses pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat berbasis *Smart City*. Hal tersebut tergambar pada tabel 2.5 yang merupakan hasil analisis dari keseluruhan aspek pendukung berjalanya proses pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 21. Analisis Ketersediaan Infrastruktur Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat

No.	Bagian yang dianalisis	Kondisi	Interpretasi
1.	Persentase ASN dengan tingkat sarjana (S1/S2/Doktor/Ph.D)	62.54%	Baik
2.	Persentase Peralatan Komputer untuk Setiap OPD (42 OPD)	100%	Baik
3.	Persentase ketersediaan jaringan intranet (LAN)	18.5%	Kurang
4.	Persentase ketersediaan jaringan internet	100%	Baik
5.	Ketersediaan sistem informasi publik, penyebaran informasi daerah	Ada (https://acehbaratkab.go.id/)	Baik
Persentase ketersediaan data center			
Komputer Sendiri		90.5%	Baik
Server OPD		7.1%	
Data Center Diskominfo		2.5%	
Ketersedian Aplikasi			
Aplikasi bagi-pakai		92.9%	Baik
Aplikasi pengembangan sendiri		7.1%	

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyadari pentingnya implementasi *Smart City* sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan *Smart City* menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur teknologi informasi yang memadai, ketersediaan peralatan komputer di setiap OPD, jaringan intranet dan internet yang terhubung dengan baik, serta keberadaan data center untuk pengelolaan data dan informasi. Selain itu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam sistem informasi juga menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan *Smart City*.

Dalam rangka mendukung visi Diskominfo Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berkomitmen untuk mengembangkan aplikasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan OPD dan memastikan ketersediaan aplikasi umum yang dapat digunakan oleh seluruh OPD. Melalui integrasi layanan SPBE dan pemetaan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berusaha untuk memperbaiki sistem penghubung layanan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.

Dengan fokus pada kesiapan dan visi yang kuat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya menciptakan ekosistem *Smart City* yang mendukung kemajuan dan kemudahan bagi masyarakat. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat terjalin dengan baik guna mewujudkan *Smart City* yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh warga Kabupaten Aceh Barat.

2.1.3. Kapasitas Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan Daerah meliputi (a) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, (b) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga (c) Penerimaan Daerah, (d) Pengeluaran Daerah, (e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau (f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian di bidang keuangan daerah yang meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang dipedomani antara lain meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kapasitas keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk periode 2018 hingga 2022 digunakan sebagai kerangka keuangan untuk masa yang akan datang. Proses ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi semua sumber penerimaan daerah yang akan dialokasikan ke pos-pos yang berbeda. Sumber penerimaan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan sumber-sumber lainnya. Setelah itu, dilakukan pengurangan terhadap berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta merupakan prioritas utama.

Dengan menghitung seluruh penerimaan daerah dan mengurangi berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, dapat diperoleh kapasitas riil keuangan

daerah. Kapasitas ini mencerminkan jumlah total penerimaan daerah yang tersedia setelah dipertimbangkan dan dikurangi dengan berbagai kewajiban dan prioritas belanja.

Dengan memahami kapasitas riil keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah. Hal ini memungkinkan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah serta memastikan keberlanjutan keuangan daerah dalam jangka panjang, salah satunya adalah pengembangan *Smart City*.

Sebelum mengalokasikan berbagai pos belanja dan pengeluaran, ada kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan untuk setiap sumber penerimaan. Beberapa kebijakan tersebut adalah: Penerimaan retribusi pajak: Alokasi belanja untuk penerimaan retribusi pajak diarahkan pada program atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan pelayanan di mana retribusi tersebut dipungut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari retribusi pajak digunakan dengan tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan: Penerimaan ini dialokasikan kembali untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi. Artinya, dana yang diperoleh dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan digunakan untuk melakukan investasi yang berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang bagi daerah.

Penerimaan dana alokasi umum: Prioritas dalam penggunaan dana alokasi umum adalah untuk belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai kebutuhan pegawai dan operasional pemerintah daerah agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Penerimaan dari dana alokasi khusus: Dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan pengalokasiannya. Misalnya, jika dana tersebut diperoleh untuk tujuan tertentu seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan sektor tertentu, maka alokasi belanja akan diarahkan sesuai dengan tujuan tersebut.

Penerimaan dana bagi hasil: Dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai dengan jenis dana bagi hasil yang diperoleh. Dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang berdampak positif pada lingkungan.

2.1.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas

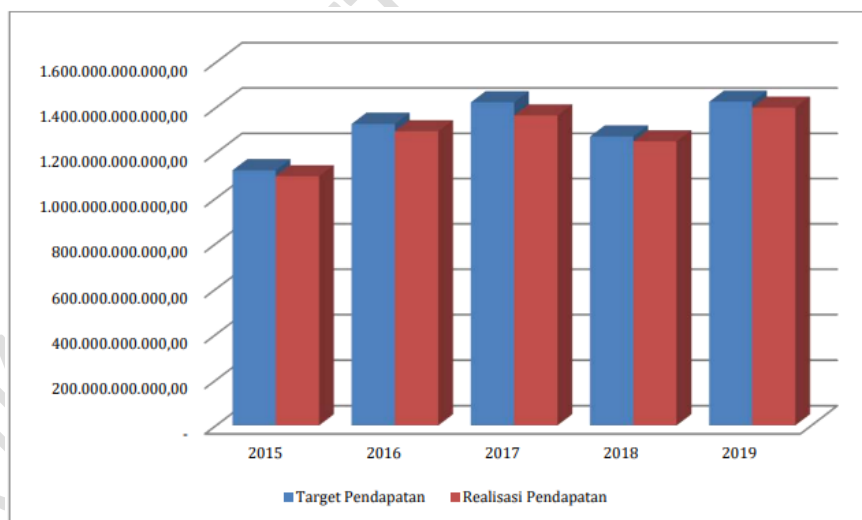
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkembangan target pendapatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20 persen. Target pendapatan terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp1.123.121.406.718,63 dengan realisasi sebesar Rp1.096.523.414.978,27 atau 97,63 persen. Sedangkan target pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp1.425.410.708.131,00 dengan realisasi sebesar Rp1.399.139.190.532,32 atau 98,16 persen. Pada Tahun 2018 target pendapatan lebih kecil dari target tahun 2017 dan 2018, dikarenakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
2015	1.123.121.406.718,63	1.096.523.414.978,27	97,63%
2016	1.328.002.541.504,78	1.295.097.000.760,22	97,52%
2017	1.422.813.210.350,69	1.364.767.898.288,08	95,92%
2018	1.272.036.731.259,90	1.250.681.695.136,38	98,32%
2019	1.425.410.708.131,00	1.399.139.190.532,32	98,16%
Jumlah	6.571.384.597.965,00	6.406.209.199.695,27	97,49%

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020



Gambar 24. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Tahun 2015 kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 61,44 persen, PAD sebesar 11,89 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 26,67 persen. Tahun 2019 kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 58,21 persen, PAD sebesar 10,99 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 30,79 persen. Rincian kinerja anggaran pendapatan terlihat pada tabel berikut.

Disamping itu, pada awal tahun 2022, target pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ditetapkan sebesar Rp 1.243.508.605.754,00 triliun rupiah. Namun, melalui pembahasan APBK Perubahan, target pendapatan tersebut berhasil meningkat menjadi Rp 1.272.590.146.832,34 triliun rupiah. Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 1.329.776.515.550,65 triliun rupiah. Realisasi pendapatan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 104,49 persen (Sumber: [IPM Aceh Barat Tahun 2022 Meningkat 0,93 Persen - Serambinews.com \(tribunnews.com\)](https://www.serambinews.com/tribunnews.com)).

Kelebihan realisasi pendapatan daerah ini menunjukkan pencapaian yang positif dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada, baik melalui penerimaan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya.

2.1.3.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Jumlah anggaran belanja Pemkab Aceh Barat selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,76 persen. Target belanja daerah Tahun 2015 sebesar Rp1.251.480.209.153,87 dengan realisasi sebesar Rp1.123.320.640.321,60 atau 89,76 persen, tahun 2015 merupakan alokasi belanja terendah selama 5 tahun terakhir. Sedangkan alokasi belanja daerah tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp1.508.769.853.346,26 dengan realisasi sebesar Rp1.366.760.779.513,00 atau 90,59 persen.

Tabel 23. Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja 2015 – 2019

Tahun	Pagu Belanja	Realisasi Belanja	%
2015	1.251.480.209.153,87	1.123.320.640.321,60	89,76%
2016	1.406.174.099.852,29	1.329.717.090.209,53	94,56%
2017	1.464.801.068.660,89	1.353.258.094.692,40	92,39%
2018	1.325.114.624.443,78	1.216.330.094.839,00	91,79%
2019	1.508.769.853.346,26	1.366.760.779.513,00	90,59%
Jumlah	6.956.339.855.457,09	6.389.386.699.575,53	91,85%

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020

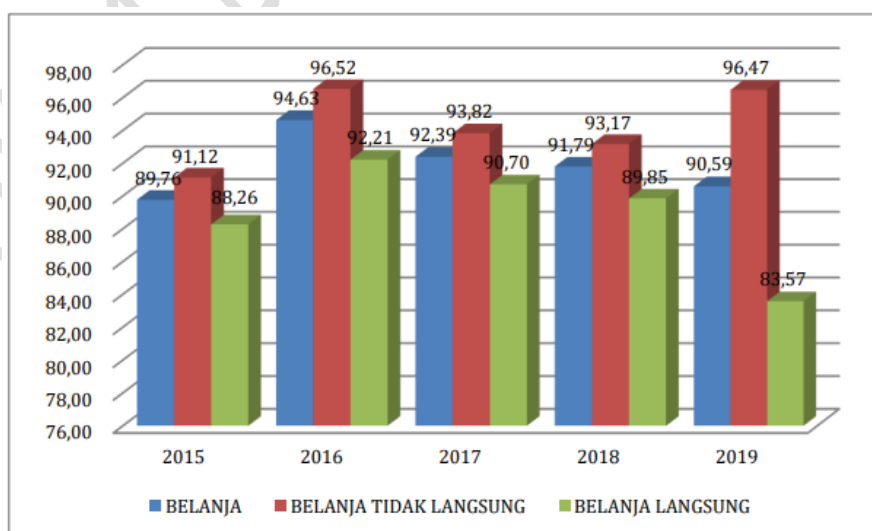
Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja dari tahun 2015-2019, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2015-2019

Kode	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
5	BELANJA	89,76	94,63	92,39	91,79	90,59
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	91,12	96,52	93,82	93,17	96,47
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	88,91	94,80	90,75	92,01	94,60
5 . 1 . 3	Belanja Subsidi	-	-	0,00	100,00	100,00
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	99,10	99,70	89,19	95,21	93,95
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	92,85	98,45	95,60	88,16	99,25
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	98,71	100,00	99,69
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	98,52	99,58	99,09	99,71	99,67
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	85,37	-	0,40	0,00	0,57
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	88,26	92,21	90,70	89,85	83,57
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95,35	95,59	97,88	93,76	67,80
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87,67	92,54	88,80	87,01	93,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal	87,93	91,59	91,56	92,99	81,10

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Realisasi belanja daerah dari tahun 2015 – 2019 rata-rata sebesar 91.83 persen, dengan rincian rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 94,22 persen, dan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 88.92 persen.



Gambar 25. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2017-2019 (Persen)

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Pada awal tahun 2022, belanja daerah Pemerintah Aceh Barat dianggarkan sebesar Rp 1.294.517.871.076,00 triliun rupiah. Namun, melalui APBK Perubahan, terjadi penambahan anggaran menjadi Rp 1.381.559.675.657,21 triliun rupiah. Realisasi belanja daerah pada tahun tersebut mencapai Rp 1.330.736.825.406,15 triliun rupiah, yang setara dengan 96,32 persen dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja daerah yang mencapai persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan dan program pemerintah daerah. Meskipun realisasi belanja daerah tidak mencapai 100 persen dari target, namun angka 96,32 persen menunjukkan tingkat penggunaan anggaran yang cukup tinggi.

2.1.3.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

Selama tahun 2015 – 2019, penerimaan pembiayaan daerah rata-rata tumbuh sebesar 1,03 persen, dengan sumber terbesarnya adalah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA ini terjadi karena penghematan belanja dan adanya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.

2.1.3.4. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

APBK Aceh Barat selama 5 (lima) tahun terakhir ini tercatat pada tahun 2017-2019 surplus. TA 2017 surplus sebesar Rp9.946.192.740,68, TA 2018 surplus sebesar Rp33.931.831.575,38, dan TA 2019 surplus sebesar Rp8.462.771.019,32. Sehingga setelah ditambah SiLPA tahun anggaran sebelumnya, sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2017, TA 2018, dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp53.497.661.905,88, Rp87.429.493.481,26, dan sebesar Rp122.477.637.100,58.

Sementara itu, untuk tahun 2022 pembiayaan daerah diarahkan untuk menggunakan sisa lebih anggaran tahun 2021 guna menutupi defisit anggaran tahun 2022. Dalam hal ini, terdapat realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 108.969.528.824,87 miliar rupiah, namun tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan daerah. Oleh karena itu, realisasi pembiayaan netto tetap sama dengan jumlah tersebut (Sumber: [IPM Aceh Barat Tahun 2022 Meningkat 0,93 Persen - Serambinews.com \(tribunnews.com\)](#)).

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 108.009.218.969,37 miliar rupiah. SILPA merupakan selisih antara pendapatan dan belanja, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah melebihi total belanja yang dilakukan pada tahun tersebut.

2.1.3.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan merencanakan penggunaan dana tersebut. Tabel 2.6 merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kabupaten aceh barat tahun 2018 – 2022.

Tabel 25. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Target Tahun ke-				
		2018*	2019*	2020*	2021**	2022**
1.	Pendapatan	1.272.036.731.259,90	1.425.410.708.131,00	1.308.478.789.897,00	1.266.529.473.432,00	1.358.156.256.648,00
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	53.497.661.905,88	87.429.493.481,26	122.477.637.099,89	8.877.454.065,00	7.271.741.391,68
Total penerimaan		1.325.534.393.165,78	1.512.840.201.612,26	1.430.956.426.996,89	1.275.406.927.497,00	1.365.427.998.039,68
Dikurangi:						
4.	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	732.993.985.447,60	818.148.386.974,68	835.490.012.265,52	597.608.169.454,67	636.929.863.160,17
5.	Pengeluaran Pembiayaan	419.768.722,00	4.070.348.266,00	46.659.906.300,00	-	-
Kapasitas riil kemampuan keuangan		592.120.638.996,18	690.621.466.371,58	548.806.508.431,37	677.798.758.042,34	728.498.134.879,51

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Ket :

* Angka Perubahan APBK

** Angka Proyeksi

Kapasitas kemampuan keuangan riil tahun 2018-2020 tumbuh positif dengan besaran bervariasi setiap tahun, perhitungan ini berdasarkan agregat dari pendapatan yang tumbuh positif. Beberapa catatan dari kemampuan keuangan selama 3 tahun pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2020 diatas adalah bahwa pendapatan yang tumbuh positif masih sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk proyeksi kemampuan keuangan tahun 2021 dan 2022, dengan munculnya wabah Covid-19, diproyeksikan menurun sesuai dengan mempedomani penyesuaian dana transfer yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas keuangan riil pemerintah Kabupaten Aceh Barat,

harus meningkatkan pendapatan asli daerah, pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Disisi lain perlu menekan belanja wajib mengikat seperti dengan cara mengendalikan jumlah pegawai atau meningkatkan efektivitas kelembagaan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

1. Rencana alokasi prioritas I, yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dialokasikan sebagai konsekuensi penganggaran dari pemerintah pusat atau dana daerah urusan bersama.
2. Rencana alokasi prioritas II, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah.
3. Rencana alokasi prioritas III, yakni belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 26. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Target Tahun ke-				
	2018*	2019*	2020*	2021	2022
Kapasitas riil kemampuan keuangan	592.120.638.996,18	690.621.466.371,58	548.806.508.431,37	677.798.758.042,34	728.498.134.879,51
Prioritas I	311.129.258.877,71	303.897.507.673,00	238.088.688.295,00	246.912.182.000,00	279.912.182.000,00
Prioritas II	179.149.249.251,00	262.514.057.033,00	237.483.515.979,00	378.552.553.082,00	386.271.021.012,76
Prioritas III	101.842.130.867,47	124.209.901.665,58	73.234.304.157,37	52.334.022.960,34	62.314.931.866,75

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Ket :

*Angka APBK

Melihat kapasitas riil keuangan diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja kedepan, yaitu :

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan terhadap urutan prioritas, sehingga program yang dilaksanakan dapat menuntaskan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.
2. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah di segi pendapatan asli daerah.
3. Perlu adanya optimalisasi peran serta sektor swasta dalam pendanaan pembangunan maupun potensi pendanaan melalui corporate social responsibility (CSR).

Ketiga pertimbangan di atas diambil, mengingat keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah Aceh Barat, utamanya dalam kepentingan pengembangan *Smart City*. Untuk itu, Perangkat Daerah Aceh Barat di masa mendatang mencoba mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya keuangan untuk menjalankan program *Smart City* baik dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), sponsorship, maupun dana promosi lainnya.

Perlu menjadi catatan penting, dalam pemilihan pola penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan, antara lain:

1. Umur ekonomis sumber daya TIK
2. Ketersediaan anggaran
3. Tingkat keusangan (obsolescence)
4. Nilai strategis TIK
5. Karakteristik proyek (skala, risiko, dan lain-lain)
6. Urgensi
7. Ketersediaan pemasok
8. Ketersediaan sumber daya
9. Capital budgeting
10. Visi dan misi institusi

Perlu diperhatikan bahwa tidak ada rumus tunggal (one size fits all) dalam penentuan pola penganggaran TIK, oleh karena itu Pemerintah Daerah Aceh Barat diharapkan mempertimbangkan semua faktor secara komprehensif. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/2007, terdapat tiga indikator keberhasilan Manajemen Belanja/Investasi TIK, yakni:

1. Digunakannya sumber-sumber pendanaan yang efisien.
2. Kesesuaian realisasi penyerapan anggaran TIK dengan realisasi pekerjaan yang direncanakan.
3. Diperolehnya sumber daya TIK yang berkualitas melalui proses belanja/investasi TIK yang efisien, cepat, bersih, dan transparan.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat secara maksimal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, diperlukan regulasi yang jelas yang mengatur aspek-aspek teknis, keuangan, dan kebijakan terkait implementasi *Smart City*. Regulasi ini harus memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak terkait untuk menjalankan program *Smart City* dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya, komitmen dari pemimpin daerah Kabupaten Aceh Barat sangat penting dalam mewujudkan *Smart City*. Pemimpin daerah Kabupaten Aceh Barat harus memiliki kesadaran dan visi yang kuat terhadap pentingnya pengembangan *Smart City* serta memastikan bahwa program ini mendapatkan prioritas dan dukungan yang memadai. Pemimpin daerah Kabupaten Aceh Barat juga harus aktif terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program *Smart City* untuk memastikan pencapaian hasil yang diharapkan.

Perencanaan yang matang menjadi kunci kesuksesan program *Smart City*. Perencanaan harus mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan yang jelas, pemetaan sumber daya yang tersedia, dan pengaturan langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan, perlu juga dilakukan prediksi dampak yang mungkin dihasilkan setelah implementasi konsep *Smart City*. Dengan begitu, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengoptimalkan manfaat yang akan diperoleh dan mengatasi potensi kendala yang muncul.

Melalui regulasi yang jelas, komitmen pemimpin daerah, dan perencanaan yang matang, diharapkan program *Smart City* dapat diimplementasikan dengan sukses. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya finansial dan teknologi yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan *Smart City* yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Tabel 27. Ringkasan Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat

No.	Indikator	Kondisi
1.	Persentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019	10,99%
2.	Persentase Pendapatan Lainnya Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019	30,79%
3.	Total Realisasi Pendapatan Daerah Aceh Barat Tahun 2022	Rp. 1.329 Triliun
4.	Persentase Rerata Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Aceh Barat Tahun 2015 - 2019	1,03%
5.	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022	Rp. 108.009.218.969,37 Miliar
6.	Persentase Perbandingan Anggaran Belanja terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam Rentang Tahun 2015 - 2019	91,85%
7.	Persentase Rerata Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Aceh Barat Tahun 2015 - 2019	Belanja Langsung 88,92% dan Belanja Tidak Langsung 94,22%
8.	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019	81,10%
9.	Jumlah Anggaran <i>Smart City</i> dalam Alokasi APBD Tahun 2022	N/A
10.	Jumlah Anggaran <i>Smart City</i> dalam alokasi APBD Tahun 2023	N/A
11.	Jumlah Program yang Mendukung Pengembangan <i>Smart City</i> di Kabupaten Aceh Barat	N/A
12.	Nilai Stakeholder yang Masuk untuk Berinvestasi di Kabupaten Aceh Barat	N/A
13.	Jumlah Sumber Pendanaan Alternatif untuk Mendukung Pembangunan <i>Smart City</i> Daerah Kabupaten Aceh Barat	N/A

Tabel 27 di atas menyajikan berbagai indikator terkait kondisi keuangan dan penganggaran di Kabupaten Aceh Barat, serta beberapa informasi terkait rencana pengembangan *Smart City*. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa:

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 sebesar 10,99%. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan keuangan yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah. Persentase ini menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2019.
2. Persentase Pendapatan Lain Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 sebesar 30,79%. Pendapatan Lain Daerah adalah penerimaan daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Persentase ini menunjukkan seberapa besar sumbangan Pendapatan Lainnya terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2019.
3. Total Realisasi Pendapatan Daerah Aceh Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 1.329 Triliun. Angka ini mencerminkan total penerimaan daerah yang berhasil direalisasikan pada tahun 2022.
4. Persentase Rerata Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Aceh Barat Tahun 2015 - 2019 sebesar 1,03%. Persentase ini menggambarkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2015 hingga 2019. Penerimaan pembiayaan daerah merupakan selisih antara total penerimaan dengan total belanja daerah.
5. Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp. 108.009.218.969,37 Miliar. SILPA merupakan selisih antara total penerimaan daerah dan total belanja daerah pada tahun 2022. Jumlah SILPA ini menunjukkan surplus atau kelebihan anggaran pada tahun tersebut.
6. Persentase Perbandingan Anggaran Belanja terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam Rentang Tahun 2015 - 2019 sebesar 91,85%. Persentase ini menggambarkan seberapa besar perbandingan antara anggaran belanja yang telah dianggarkan dengan realisasi belanja daerah dari tahun 2015 hingga 2019.
7. Persentase Rerata Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Aceh Barat Tahun 2015 - 2019 adalah Belanja Langsung 88,92% dan Belanja Tidak Langsung 94,22%. Persentase ini menunjukkan rata-rata perbandingan antara anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rentang tahun 2015 hingga 2019.
8. Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 sebesar 81,10%. Persentase ini menunjukkan seberapa besar kontribusi belanja modal dalam total belanja daerah pada tahun 2019. Belanja modal adalah belanja untuk membangun atau meningkatkan aset daerah yang bersifat produktif dan bersifat permanen.
9. Sementara itu, diketahui bahwa, informasi mengenai Jumlah Alokasi Anggaran *Smart City* dalam APBD di Kabupaten Aceh Barat, termasuk informasi mengenai stakeholder yang

masuk untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Barat, dan jumlah sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan *Smart City* daerah Kabupaten Aceh Barat sejauh ini masih belum tersedia.

Data dan informasi dalam tabel di atas menjadi penting dalam rangka memahami kondisi keuangan daerah, kinerja anggaran, dan potensi pengembangan *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat. Sehingga, pengembangan *Smart City* pada Kabupaten Aceh Barat dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.

2.2. Infrastruktur

Kesiapan infrastruktur fisik di Kabupaten Aceh Barat menjadi aspek yang krusial dalam perencanaan dan pembangunan *Smart City* di daerah tersebut. Infrastruktur fisik meliputi berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan dan pelayanan publik, serta memastikan berjalannya berbagai layanan teknologi informasi yang mendukung konsep *Smart City*.

Beberapa elemen infrastruktur fisik yang penting untuk menjadi titik tolak dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat antara lain:

Jaringan Jalan dan Transportasi: Ketersediaan jaringan jalan yang baik, lancar, dan terkoneksi dengan baik menjadi kunci dalam memudahkan mobilitas penduduk dan barang. Jalan yang baik akan memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang optimal, mendukung sistem transportasi publik, dan memperlancar aliran lalu lintas.

Ketersediaan Listrik dan Energi: Pemastian pasokan listrik yang stabil dan terjangkau adalah prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan *Smart City*. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta sistem *Smart City* membutuhkan pasokan listrik yang dapat diandalkan dan efisien.

Ketersediaan Internet dan Jaringan Komunikasi: Akses internet yang cepat, andal, dan merata di seluruh wilayah kota adalah fundamental dalam mewujudkan *Smart City*. Teknologi Internet of Things (IoT) dan komunikasi antarperangkat memerlukan jaringan yang stabil dan berkualitas.

Pusat Data (Data Center): Infrastruktur untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data menjadi sangat penting dalam implementasi *Smart City*. Pusat data yang handal dan aman memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data secara efektif untuk pengambilan keputusan yang cerdas.

Penyediaan Layanan Publik Berbasis TIK: Ketersediaan fasilitas publik seperti pusat pelayanan masyarakat, rumah sakit, sekolah, dan lainnya yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Ketersediaan Ruang Publik dan Rekreasi: Penyediaan ruang terbuka hijau, taman, dan fasilitas rekreasi lainnya merupakan bagian penting dari pembangunan *Smart City* yang berfokus pada kenyamanan dan kualitas hidup penduduk.

2.2.1. Infrastruktur Fisik

Saat ini berdasarkan data tahun 2021, Kabupaten Aceh Barat memiliki total panjang jalan mencapai 682,42 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 54,83% sudah beraspal, dan telah memberikan akses yang lebih baik dan nyaman bagi pengguna jalan di Kabupaten Aceh Barat. Namun, terdapat sekitar 38,01% jalan yang belum diaspal, serta 7,16% lainnya yang permukaannya berupa tanah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari total panjang jalan masih belum beraspal, yang dapat menjadi tantangan dalam mobilitas dan kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan di Kabupaten Aceh Barat.

Lebih rinci, apabila ditilik dari kualitas jalan. Dari total panjang jalan di Kabupaten Aceh Barat, sekitar 50.31 persen dalam kondisi baik, sementara sekitar 4.98 persen masih dalam kondisi sedang. Hal ini menandakan mayoritas jalan dalam kondisi baik, yang menjadi suatu keuntungan bagi masyarakat Aceh Barat karena aktivitas perekonomian dapat berjalan lebih lancar. Namun, sekitar 36.62 persen dari total jalan tersebut dalam kondisi rusak, dan 8.09 persen kondisi jalan rusak berat. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan agar dapat memaksimalkan manfaat dari sarana transportasi yang ada. Tabel 3.22 menunjukkan data lengkap mengenai kondisi jalan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 28. Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 - 2021

Uraian	2020 Km	%	2021 Km	%
Kondisi Jalan				
Baik	328.65	48.16	343.33	50.31
Sedang	39.44	5.78	33.99	4.98
Rusak	257.82	37.78	249.90	36.62
Rusak Berat	56.50	8.28	55.20	8.09
Jenis Permukaan				
Aspal	359.84	52.73	374.15	54.83
Tidak di Aspal	281.02	41.18	259.42	38.01
Lainnya	41.56	6.09	48.85	7.16

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Kab. Aceh Barat, 2022

Dengan sebagian besar jalan dalam kondisi baik, diharapkan arus perdagangan dan pemasaran hasil alam seperti pertanian, pertambangan, dan produk industri dapat lebih lancar. Kemajuan sarana transportasi dapat memperlancar mobilitas barang dan orang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan distribusi produk. Selain itu, kondisi jalan yang baik juga berdampak positif pada sektor pariwisata dan investasi, karena aksesibilitas yang lebih baik akan menarik minat wisatawan dan potensial investor.

Mengingat pentingnya peran sarana transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas. Pengaspalan dan perbaikan jalan yang tepat waktu akan membantu memastikan kondisi jalan tetap baik, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat.

Disamping keadaan jalan, sarana lalu lintas jalan juga menjadi faktor penting dalam memberikan layanan prima kepada pengguna jalan. Tabel 3.23 memperlihatkan sebaran data terkait sarana lalu lintas jalan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 29. Jumlah Sarana Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Sarana Lalu Lintas Jalan	Satuan	Jumlah (2022)
1.	Traffic Light	Titik	3
2.	Rambu Jalan	Unit	890
3.	Rambu Cermin	Unit	17
4.	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain	Unit	690
5.	Rambu Bersuar Lalin Darat Lain-Lain	Unit	15
6.	Halte	Unit	7
7.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	Unit	8

Secara administratif, kecamatan Johan Pahlawan adalah lokasi utama dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kota Meulaboh. Sebagai pusat kota, hampir seluruh aktivitas bisnis dan pusat perkantoran terkonsentrasi di kota Meulaboh. Sementara itu, pasar merupakan salah satu sarana penting yang wajib difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung perputaran transaksi ekonomi di suatu daerah. Pun sama halnya dengan pemerintah daerah Aceh Barat. Untuk mendukung transaksi jual beli masyarakatnya, pemerintah daerah Aceh Barat membuka beberapa titik layanan pasar tradisional di Kabupaten Aceh Barat. Tabel 3.24 memperlihatkan daftar sebaran pasar tradisional per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2020.

Tabel 30. Daftar Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020

No.	Nama Pasar	Letak Kecamatan	Alamat
1.	Pasar Lapang	Johan Pahlawan	Jll. Sisinga Mangaraja
2.	Pasar Simpang 4 Rundeng	Johan Pahlawan	Jl Nasional
3.	Pasar Ikan	Johan Pahlawan	Leuhan
4.	Pasar Seuneubok	Johan Pahlawan	Jl Imam Bonjol
5.	Pasar Ujong Baroh	Johan Pahlawan	Jl PPI. Kode Pos: 23615.
6.	Pasar Keureuseng	Samatiga	Jl MBO - Kuala Bhee. Kode Pos: 23652.
7.	Pasar Aceh	Johan Pahlawan	Jl Sudirman. Kode Pos: 23612.
8.	Pasar Ikan Gp. Teungoh	Samatiga	Jl MBO - Banda Aceh. Kode Pos: 23652.
9.	Pasar Layung	Bubon	Jl MBO - Kuala Bhee.

No.	Nama Pasar	Letak Kecamatan	Alamat
10	Pasar Pribu	Arongan Lambalek	Jl MBO - Banda Aceh, Desa Pribu, Kec Arongan Lambalek.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Apabila ditinjau dari aspek konektivitas, Kabupaten Aceh Barat tepatnya Kota Meulaboh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW ini mengandung makna perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di wilayah pesisir barat selatan Aceh. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Disamping itu, Meulaboh selaku ibu kota Kabupaten Aceh Barat ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Pelabuhan Nasional satu-satunya di wilayah barat selatan Aceh. Hal tersebut sangat dimungkinkan, selain posisi daerah yang memang berada di garis pantai, Kabupaten Aceh Barat juga memiliki total 8 fasilitas pelabuhan dan terminal bis.

Ditinjau dari sudut pandang sistem transportasi darat, armada transportasi yang banyak mendominasi adalah jenis angkutan pribadi dan umum. Untuk pergerakan angkutan umum skala regional yaitu dilakukan dengan menggunakan Bus 3/4 dan Angkutan L-300. Sedangkan angkutan barang yang melintasi baik dari tujuan Banda Aceh-Calang-Melaboh-Jeuram-terus menuju Aceh Singkil, umumnya berupa truk besar dan sedang dan kendaraan bak terbuka, angkutan ini melakukan perlintasan maupun sebagai angkutan pemasok kebutuhan pasar lokal. Angkutan barang yang biasa melalui wilayah ini merupakan angkutan sembako dan material bangunan.

Pola pergerakan transportasi eksternal (Aceh Barat) lebih dikenal dengan pergerakan regional dilayani oleh beberapa moda angkutan yang digunakan untuk melayani kegiatan masyarakat berupa Bus besar, Bus sedang dan L-300. Pergerakan yang melintasi dalam Kota Meulaboh didominasi oleh angkutan penumpang.

Tabel 31. Jumlah Kendaraan Umum Penumpang Menurut Nama Perusahaan dan Trayek di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Nama Perusahaan	Trayek	Jenis	Jumlah Kendaraan	Daya Angkut per Unit (orang)
Fa. ACEH BARAT	Banda Aceh - Kota Fajar	L-300/Hiace	8	12
	Banda Aceh - Bakongan	L-300/Hiace	3	12
	Banda Aceh - Singkil	L-300	6	12
	Meulaboh - Bakongan	L-300/Hiace	7	12
	Meulaboh - Singkil	L-300	3	12
	Meulaboh - Tapak Tuan	L-300/Hiace	2	12
	Banda Aceh - Tapak Tuan	L-300	10	12
	Banda Aceh - Jeuram	L-300	1	12
	Banda Aceh - Subulussalam	L-300/Hiace	4	12
	Banda Aceh - Blangpidie	L-300	2	12
	Meulaboh - Banda Aceh	L-300/KIA	6	12

Nama Perusahaan	Trayek	Jenis	Jumlah Kendaraan	Daya Angkut per Unit (orang)
CV. METRO SARANA GROUP	Banda Aceh – Alue Bilie	L-300	3	12
	Banda Aceh – Peureumeu	L-300	2	12
	Banda Aceh – Suak Seumaseh	L-300/KIA	2	12
	Banda Aceh - Jeuram	L-300	3	12
	Banda Aceh - Manggeng	L-300/KIA	2	12
	Banda Aceh – Kuala Bate	L-300	5	12
	Banda Aceh - Blangpidie	L-300	1	12
CV. BURAQ WISATA TRANSPORT	Banda Aceh – Meulaboh	L-300	3	12
	Banda Aceh – Alue Bilie	L-300	2	12
	Alue Bilie - Lhokseumawe	L-300	2	12
	Meulaboh - Lhokseumawe	L-300	3	12
	Meulaboh Bireuen	L-300	5	12
CV. PUTRA TENAGA DESA	Banda Aceh – Meulaboh	L-300/KIA/Hiace	5	12
	Banda Aceh - Jeuram	L-300/Hiace	4	12
	Banda Aceh – Tapak Tuan	L-300/KIA/Hiace	4	12
	Banda Aceh - Singkil	L-300/Hiace	4	12
CV. RENCONG MAS	Banda Aceh - Calang	L-300	4	12
	Banda Aceh - Subulussalam	L-300	3	12
	Banda Aceh - Tapak Tuan	L-300	2	12
	Banda Aceh - Bakongan	L-300	4	12
CV. INTAN SAUDARA TOUR	Meulaboh - Banda Aceh	L-300	2	12
	Meulaboh - Tapak Tuan	L-300	4	12
	Meulaboh - Langsa	L-300	2	12
CV. DEK KAS	Meulaboh - Banda Aceh	L-300	14	12
CV. TESSA MERPATI GROUP	Meulaboh - Medan	L-300	6	12
	Meulaboh - Medan	3/4		

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

Di bidang pendidikan, terdapat 188 unit sekolah untuk jenjang sekolah dasar. 71 unit sekolah untuk jenjang sekolah menengah pertama. Sementara itu, sebanyak 39 unit sekolah untuk jenjang sekolah menengah atas. Secara keseluruhan bangunan pendidikan (sekolah) dalam kondisi baik. Hal ini merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan sekolah yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat.

Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai di Aceh Barat merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang menjadi salah satu dimensi penting *Smart City*. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang diperlukan dan mendapatkan perawatan yang berkualitas. Hingga tahun 2019, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Barat terpantau sebanyak 4 Rumah Sakit, 13 Puskesmas, dan 14 Klinik, yang tersebar merata di Kabupaten Aceh Barat.

Dari sisi pertumbuhan penggunaan energi listrik di Kabupaten Aceh Barat. Bertambahnya jumlah pelanggan, serta penambahan daya yang dipakai masyarakat, mengindikasikan bahwa Kabupaten Aceh Barat telah siap melakukan pemerataan energi listrik ke seluruh pelosok desa. Hal ini penting, karena energi listrik merupakan salah satu komponen utama yang menyokong pelaksanaan *Smart City*. Hingga tahun 2021, terdapat 321 desa yang telah dialiri listrik. Jumlah pelanggan PLN di Aceh Barat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 terus bertambah, dari sebesar 26.78 ribu pelanggan di tahun 2017 menjadi 66.32 ribu pelanggan pada tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada penjualan listrik selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017, jumlah kwh listrik yang terjual adalah sebesar 239.84 juta kwh dan pada 2021 jumlah kwh yang terjual mencapai 323.28 juta kwh. Dari segi pertumbuhannya, pengadaan listrik tumbuh sebesar 1.04 persen di tahun 2021.



Gambar 26. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Jumlah Kwh yang terjual

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Kab. Aceh Barat, 2022

2.2.2. Infrastruktur Digital

Ketersediaan infrastruktur jaringan intra pemerintah yang menghubungkan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) merupakan hal penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah daerah. Jaringan intra pemerintah adalah jaringan komputer tertutup yang memungkinkan berbagi data, informasi, dan sumber daya secara aman dan terbatas antara berbagai unit dan bagian pemerintahan yang berada dalam satu wilayah pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan atas ketersediaan infrastruktur jaringan intra pada masing-masing OPD yang berjumlah 42 OPD, diketahui bahwa umumnya setiap OPD telah memiliki jaringan intra organisasi. Walaupun masih terdapat OPD yang belum memiliki jaringan komputer lokal yang menghubungkan antar komputer dalam satu OPD. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam berbagi informasi dan kolaborasi antar unit kerja di dalam pemerintah daerah. Ketidaktersediaan jaringan intra pemerintah yang memadai dapat mempengaruhi efisiensi kerja dan akses informasi yang dibutuhkan oleh setiap OPD. Sebaliknya, dengan

membangun jaringan komputer lokal dengan baik, dapat mengoptimalkan komunikasi data di internal OPD. Yang pada akhirnya berguna untuk mendukung layanan SPBE yang terintegrasi.

Sejauh ini, model topologi jaringan intra yang dipakai pada setiap titik OPD Kabupaten Aceh Barat adalah topologi star. Penggunaan topologi ini masih dipandang cukup aman untuk digunakan. Dimana setiap perangkat di dalam Demilitarization Zone (DMZ) terlindungi oleh firewall yang berada di MIMS. Disamping itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang bersiap melakukan pemasangan VPN pada setiap titik jaringan intra, hal tersebut berdampak pada interoperabilitas OPD akan sangat terlindungi dengan lapisan pengamanan yang berlapis.

Jika ditinjau dari aspek akses internet, secara umum seluruh daerah Kabupaten Aceh Barat telah terkoneksi kedalam jaringan internet. Hal tersebut dimungkinkan karena hampir keseluruhan daerah di Kabupaten Aceh Barat telah terpasang serat *fiber optic*, yang pemasangannya telah dimulai dari sejak tahun 2010. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengguna internet di daerah Kabupaten Aceh Barat, yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan.

Sepanjang tahun 2019, terdapat 2.214 pemasangan baru sambungan Indihome di Meulaboh. Walaupun jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 terdapat 6.962 pemasangan baru sambungan indihome. Penurunan ini terjadi akibat banyaknya provider swasta yang lebih luas aksesnya dibanding dengan indihome, selain itu promo harga paket data murah juga sangat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi dan akses internet di Aceh Barat. Artinya, penurunan penggunaan indihome, bukan berarti menurunkan jumlah penggunaan internet di Kabupaten Aceh Barat. Tetapi, lebih kepada banyaknya pilihan provider, yang tentu saja semakin memberikan banyak variasi pilihan kepada masyarakat dalam layanan telekomunikasi.

Dipasanginya instalasi indihome di Kabupaten Aceh Barat, memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat memperkuat konektivitas jaringan intra maupun inter bagi setiap lingkup OPDnya. Hal tersebut pula yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat memutuskan untuk menyewa jaringan *fiber optic* yang dimiliki oleh PT Telkom. Melalui Diskominsa Aceh Barat, Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada General Manager Witel Aceh perihal permintaan solusi terhadap koneksi jaringan antar OPD dengan nomor surat 555/392/VIII/2020 per tanggal 31 Agustus 2020.

Saat ini, wilayah perkantoran Pemkab Aceh Barat telah mengoptimalkan penggunaan *backbone* berteknologi *fiber optic*, melalui perawatan yang murah dan mudah. Penggunaan kabel serat optic adalah pilihan yang sangat baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dapat mewujudkan infrastruktur ini melalui kerja sama dengan Internet Service Provider (ISP) yang telah memiliki jaringan yang luas, yakni PT. Telkom. Sehingga langkah tersebut dapat menekan biaya instalasinya. Disamping itu, media transmisi wireless juga digunakan melalui penambahan titik hot spot area agar coverage wifi-nya semakin baik dan stabil sinyalnya.

Penggunaan *Broadband Wireless Access* (BWA) pada backbone sangat efisien untuk bisa diakses dari manapun pegawai pemkab Aceh Barat berada dalam menjalankan tugasnya. Setiap *mobile computer* yang telah dilengkapi hak akses bisa digunakan untuk melakukan layanan masyarakat dan berkomunikasi dengan siapapun dan tetap berada di area tertutup (Intra) dimanapun berada.

Tabel 32. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Interpretasi
1.	Ketersediaan Jaringan 4G/3G	Ya	Baik
2.	Ketersediaan Broadband Acces	Ya	Baik
3.	Akses Internet Terpusat (didistribusikan)	Tidak	-
4.	Jaringan Antar SKPK (Intra Instansi pemerintah)	Ya	Cukup
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk Publik	Ya	Baik
6.	Data Center Pemerintah	Ya	Baik
7.	Data Center Recovery Pemerintah	Tidak	-

2.2.3. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial merupakan sarana dan prasarana yang dibangun dengan tujuan untuk mempermudah dan mendukung kebutuhan sosial masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Infrastruktur sosial dapat berupa fasilitas fisik, seperti jalan, jembatan, fasilitas olahraga, gedung pertemuan, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, serta fasilitas non-fisik, seperti program-program kesejahteraan sosial dan pendidikan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sosial ini, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dengan membangun infrastruktur sosial yang memadai, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Namun, dalam realitasnya, pemerintah mungkin tidak mampu memenuhi semua kebutuhan infrastruktur sosial bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, pihak swasta juga turut berperan penting dalam penyediaan dan pengadaan infrastruktur sosial. Melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta, banyak proyek infrastruktur sosial dapat diwujudkan, termasuk dalam hal pendanaan, pengelolaan, dan pengoperasian.

Berdasarkan data tahun 2022, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Dasar/Sederajat mencapai 99,52%. APM Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah 87,4% dan APM Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat sebesar 71,15%. Tabel 3.26

merupakan jumlah fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2021.

Tabel 33. Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2021

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	PT
		2021	2021	2021	2021	2021
1.	Johan Pahlawan	30	11	8	4	7
2.	Samatiga	12	4	1	1	-
3.	Bubon	5	2	1	-	-
4.	Arongan Lambalek	12	2	1	1	-
5.	Woyla	12	5	1	2	-
6.	Woyla Barat	10	4	1	-	-
7.	Woyla Timur	9	4	1	-	-
8.	Kaway XVI	17	9	2	1	-
9.	Meureubo	19	12	3	1	4
10.	Pante Ceureumen	12	5	1	1	-
11.	Panton Reu	8	2	1	-	-
12.	Sungai Mas	9	1	1	-	-
Aceh Barat		155	61		22	11

Bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat didukung oleh 4 Ruma Sakit, 13 Puskesmas, 15 Klinik Kesehatan, 75 Puskesmas Pembantu, 372 Posyandu. Tabel 3.27 memperlihatkan jumlah fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.

Tabel 34. Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2022

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit (Umum + Swasta)	4
2.	Puskesmas	13
3.	Klinik Kesehatan	15
4.	Puskesmas Pembantu	75
5.	Posyandu	372

Ranah literasi pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam mendukung kecerdasan kehidupan bermasyarakat. Tentu saja kecerdasan masyarakat berkorelasi dengan visi *Smart City* yang hendak di bangun. Untuk itu, Pemerintah Aceh Barat memiliki dukungan berupa penyediaan perpustakaan daerah baik bersifat umum maupun perpustakaan bersifat khusus. Tabel 3.28 merupakan jumlah fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.

Tabel 35. Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2022

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah (2022)
Umum/General		340
1.	Perpustakaan Umum/ public Library	1
2.	Perpustakaan Kecamatan/ District Libraries	4
3.	Perpustakaan Desa/ Village Library	65
4.	Perpustakaan Pojok Baca/ Reading Corner Library	6
5.	Perpustakaan Taman Bacaan/ Reading Garden Library	5
6.	Perpustakaan Digital/ Digital Library	1
7.	Perpustakaan Perguruan Tinggi/ College Libraries	10
8.	Perpustakaan SD Sederajat/ Elementary High School Library	171
9.	Perpustakaan SMP Sederajat / Junior High School Libraries	39
10.	Perpustakaan SMA Sederajat/ Senior High School Libraries	38
Khusus/Private		18
11.	Perpustakaan Dinas dan kantor/ Service libraries and offices	5
12.	Perpustakaan Mesjid/ Mosque Library	6
13.	Perpustakaan Kantor/ Office library	7
Total		358

Dalam rangka menopang keanekaragaman hayati, Pemerintah Daerah Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup terus menggalakan pembuatan taman hutan kota di Daerah Aceh Barat. Keberadaan taman hutan kota, tidak hanya bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Kabupaten Aceh Barat, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai sarana dan wahana rekreasi bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat, dan juga merupakan salah satu usaha pemenuhan dimensi Smart Living yang merupakan bagian dari *Smart City*. Saat ini, Kabupaten Aceh Barat memiliki 1 taman keanekaragaman hayati yang terletak di gampong langung kecamatan meurebo, dan 1 hutan kota yang beralamat di Jl. Suak raya.

2.3. Superstruktur

Superstruktur merupakan langkah penyiapan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan *Smart City*. Superstruktur mencakup berbagai aspek yang meliputi: (1) Kesiapan Kebijakan Daerah, (2) Kesiapan Lembaga Daerah, dan (3) Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah.

2.3.1. Kesiapan Kebijakan Daerah

Kebijakan merupakan pilar penting dalam menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan *Smart City* di daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi langkah awal yang positif dalam mendukung implementasi *Smart City* di daerah tersebut. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tercipta landasan hukum yang kuat untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Disamping itu, Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat merupakan langkah strategis dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program *Smart City* secara terpadu. Dewan *Smart City* dapat berperan sebagai forum untuk mengumpulkan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan *Smart City*. Dengan adanya tim pelaksana, diharapkan pelaksanaan program dan proyek *Smart City* dapat berjalan lebih efisien dan terarah.

Selanjutnya, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan *Smart City* yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat. Kebijakan tersebut mencakup aspek teknologi, data, keamanan siber, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Selaras dengan visi dan misi Kabupaten Aceh Barat, kebijakan-kebijakan tersebut haruslah mengakomodasi kebutuhan dan prioritas daerah, sambil memperhatikan tren teknologi yang berkembang.

Kebijakan yang baik dan tepat sasaran akan membantu mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi *Smart City*, serta mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada. Selain itu, kebijakan yang adaptif dan fleksibel juga akan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan di masa depan, sehingga pembangunan *Smart City* dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan dan kesuksesan program *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat. Dengan sinergi dan kerjasama yang baik, diharapkan *Smart City* dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

Tabel 36. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah Kabupaten Aceh Barat

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi
1.	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Tahap Pembuatan	N/A

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi
2.	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Tahap Pembuatan	Sedang
3.	Adanya masterplan <i>Smart City</i> daerah	Tahap Pembuatan	N/A
4.	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan <i>Smart City</i> Daerah	Tahap Pembuatan	Baik
5.	Adanya visi pembangunan <i>Smart City</i> yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Ada	Baik
6.	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program <i>Smart City</i> dalam jangka Panjang	Ada	Baik
7.	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparaturnya dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program <i>Smart City</i>	N/A	Baik

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 3.30, kesiapan Kabupaten Aceh Barat dari segi suprastruktur sudah baik. Namun, terlepas dari kesiapan suprapasturuktur yang baik, perlu diakui bahwa keberlanjutan konsep *Smart City* adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Pengembangan *Smart City* bukanlah proyek yang sederhana dan berlangsung dalam waktu singkat, melainkan merupakan inisiatif jangka panjang yang perlu dijalankan secara berkesinambungan.

Untuk itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menyusun master plan atau rencana induk sebagai dasar pengembangan *Smart City*. *Master plan* ini akan menjadi panduan strategis dalam mengarahkan implementasi *Smart City*, mencakup tujuan, visi, misi, dan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Saat ini, rencana induk *Smart City* dan aturan Bupati yang mengatur penyelenggaraan *Smart City* Kabupaten Aceh Barat sedang dalam proses penyusunan oleh Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Aceh Barat. Kepastian terhadap keberlanjutan program *Smart City* jangka panjang tentunya harus tetap mengacu pada isi RPJMD Kabupaten Aceh Barat. Tabel 3.31 menunjukkan daftar beberapa rujukan peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan *Smart City*.

Tabel 37. Daftar Rujukan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat

No	Aturan Tentang	Dimensi	Nomor	Tahun
1.	Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan di Kab. Aceh Barat Secara Online	<i>Smart Governance</i>	35	2017
2.	Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat - 29.a Tahun 2021	<i>Smart Governance</i>	29.a	2021
3.	Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pemangku Jabatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Governance</i>	50	2022
4.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Governance/Branding</i>	59	2016
5.	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak	<i>Smart Society</i>	37	2018
6.	Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional SMA/SMK/MAS untuk Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Society</i>	9	2015
7.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Ekonomi Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Society</i>	71	2023
8.	Implementasi Sistem Informasi Tata Ruang Aceh Barat di Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Living</i>	70	2022
9.	Perubahan Atas Perbup Aceh Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Living</i>	29.b	2012
10.	Petunjuk pelaksanaan bantuan Rehabilitasi sosial Rumah tidak layak Huni kab. Aceh Barat	<i>Smart Living</i>	20	2017
11.	Pengelolaan Sampah	<i>Smart Environment</i>	4	2017

No	Aturan Tentang	Dimensi	Nomor	Tahun
12.	Kebijakan dan Strategi Kab. Aceh Barat dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	<i>Smart Environment</i>	7	2019
13.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Economy/Branding</i>	56	2016

Berdasarkan Tabel 3.31 yang menunjukkan beberapa peraturan bupati (perbup) yang telah ada di Kabupaten Aceh Barat, diharapkan bahwa regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menyusun regulasi penyelenggaraan konsep *Smart City*. Dengan adanya peraturan bupati yang telah dikeluarkan, maka terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang dapat mengatur dan mengarahkan implementasi *Smart City* di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Kedepannya, diharapkan dalam menyusun regulasi penyelenggaraan *Smart City*, penting juga untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, regulasi dapat lebih komprehensif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi seluruh stakeholders.

2.3.2. Kesiapan Lembaga Daerah

Aspek kelembagaan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan *Smart City* di daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Salah satu lembaga daerah yang dianggap krusial dalam mendukung keberlanjutan program *Smart City* adalah Dewan *Smart City*. Dewan *Smart City* akan menjadi pusat koordinasi dan pengambil keputusan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan program *Smart City*.

Dewan *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat akan ditetapkan oleh keputusan Bupati, dan peran pentingnya adalah sebagai pelengkap dalam mewujudkan keberlangsungan program *Smart City*. Setiap perangkat daerah di Kabupaten Aceh Barat akan terlibat dalam Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City*, yang akan berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan memonitor program *Smart City* secara terkoordinasi.

Beberapa fungsi dan kewenangan tugas yang dimiliki oleh Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* adalah sebagai berikut:

Dewan *Smart City*:

1. Memberikan arahan strategis pengembangan *Smart City* sesuai dengan visi, misi, dan perkembangan kebutuhan daerah.
2. Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana induk *Smart City*, rencana kerja, dan inisiatif pengembangan *Smart City*.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan implementasi *Smart City*.

Tim Pelaksana *Smart City*:

1. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan *Smart City* dalam sektor tertentu maupun lintas sektor.
2. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan *Smart City* secara terkoordinasi melalui kajian kebutuhan, perencanaan, perancangan, pembangunan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.
3. Menindaklanjuti arahan dari Dewan *Smart City*.
4. Merumuskan inisiatif inovasi terkait *Smart City* di berbagai sektor dan mengusulkan kepada Dewan *Smart City* untuk arahan dan persetujuan.
5. Melaporkan hasil kegiatan perencanaan, pengembangan, dan implementasi *Smart City* kepada Dewan *Smart City*.
6. Memfasilitasi forum-forum dan bentuk program lain yang mewadahi partisipasi pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat luas.
7. Melakukan koordinasi kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan *Smart City*.
8. Membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pengembangan *Smart City*.

Dengan adanya Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City*, diharapkan pengembangan dan pelaksanaan program *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat dapat berjalan secara terkoordinasi dan terpadu. Dukungan dan partisipasi dari berbagai perangkat daerah dan elemen masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan *Smart City* yang diinginkan dan menjadikan Kabupaten Aceh Barat sebagai kawasan yang cerdas dan berkelanjutan.

2.3.3. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Aspek non-fisik selanjutnya yang menjadi penentu dari keberlanjutan *Smart City* di daerah adalah forum organisasi di masyarakat sipil. Forum organisasi kemasyarakatan memiliki peran krusial dalam kesiapan dan pelaksanaan *Smart City*, karena partisipasi aktif masyarakat dalam forum ini merupakan inti dari konsep *Smart City*.

Beberapa komponen forum organisasi kemasyarakatan yang dapat mendukung perkembangan pelaksanaan *Smart City* di daerah antara lain:

1. Lembaga Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi di Daerah: Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah akan menjadi salah satu motor penggerak dalam pelaksanaan *Smart City*. Lembaga ini dapat memberikan kontribusi berupa penelitian, inovasi, dan solusi untuk mendukung pengembangan *Smart City* secara holistik.
2. Forum-Forum Swadaya Masyarakat Pendukung *Smart City*: Adanya forum-forum swadaya masyarakat yang mendukung *Smart City* akan memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide, gagasan, dan peran dalam pengembangan *Smart City*.
3. Jumlah Forum Swadaya Masyarakat Pendukung *Smart City*: Semakin banyak forum swadaya masyarakat yang mendukung *Smart City*, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan masukan, saran, dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.
4. Dukungan Operasional Pemerintah terhadap Forum Pendukung *Smart City*: Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung *Smart City* sangat penting untuk memastikan berjalannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh forum ini dengan lancar.
5. Jumlah Forum Pendukung *Smart City* yang Memiliki Sekretariat Definitive: Adanya sekretariat definitive pada forum pendukung *Smart City* akan membantu dalam koordinasi dan pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh forum tersebut.
6. Partisipasi Pakar dari Perguruan Tinggi Lokal dalam Dewan *Smart City* Daerah: Keterlibatan pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan *Smart City* Daerah akan memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan *Smart City*.

Saat ini, Kabupaten Aceh Barat memiliki dua lembaga pendidikan tinggi, yakni: STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh dan Universitas Teuku Umar (UTU). Disamping itu, Kabupaten Aceh Barat juga memiliki organisasi independen Teknologi Informasi, yakni: Relawan TIK (RTIK) Aceh Barat, yang di bawah koordinasi Relawan TIK Provinsi Aceh dan Nasional. Dua lembaga pendidikan tinggi tersebut, memiliki lembaga pengabdian masyarakat yang dapat membantu mewujudkan terbentuknya forum organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung berjalannya *Smart City* di Kabupaten Aceh Barat. Disamping itu, organisasi RTIK Aceh Barat, dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan literasi digital di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui OPD terkait perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan ketiga lembaga tersebut.

Sehingga, diharapkan melalui partisipasi aktif dan dukungan dari forum organisasi di masyarakat sipil, *Smart City* di daerah dapat berjalan dengan lebih terarah, berkelanjutan, dan

berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program *Smart City* akan memberikan manfaat yang lebih luas dan mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut.

3. Analisis Kesenjangan

3.1. Analisis Kesenjangan *Smart Governance*

Tabel 38. Kertas Kerja Analisis SWOT Tata Kelola (*Governance*)

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan 1. Memiliki program unggulan Aceh Barat yaitu Penyelenggaraan Pengawasan dan perumusan kebijakan pendampingan Asistensi dalam hal tata kelola pemerintahan 2. Memiliki relasi yang baik antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) di tingkat Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat (Inspektorat, BPKP dan BPK-RI) 3. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Administrasi Kependudukan 4. Tersedianya SDM yang memadai dalam Bidang Teknologi Informasi 5. Memiliki Aset Penting berupa Fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai 6. Memiliki kewenangan dalam mengawasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM, Yayasan dan Forum.	Kelemahan 1. Kurangnya pendidikan substantif Auditor atau PPUPD untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas. 2. Kurang tersedianya kendaraan Roda 4 untuk membantu Mobilitas APIP 3. Belum optimalnya sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan; 4. Perubahan regulasi sebagai pedoman yang berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan data kependudukan pada Sistem Informasi Kependudukan Terpusat; 5. Masih kurang memadainya perangkat Teknologi Informasi yang mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik; 6. Jumlah sumber daya yang terbatas disebabkan oleh penghapusan tenaga honorer; 7. Masih Kurang tersedianya Blanko KTP dari pemerintah pusat 8. Mutasi pegawai yang tidak didasarkan kepada unsur kebutuhan, kompetensi, dan masa kerja 9. Basis data organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Rumah Ibadah belum terkomputerisasi
	Peluang 1. Keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung sistem administrasi Kependudukan yang mudah diakses secara luas; 2. Adanya Program pengawasan Berbasis Risiko untuk	Strategi Peluang dan Kekuatan 1. Menentukan RTP (rencana tindak pengendalian) Inspektorat Aceh Barat untuk meluncurkan Program pengawasan berbasis risiko; 2. Menjalin Relasi yang baik sesama APIP Inspektorat Aceh Barat dalam melakukan pelatihan;

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
mempermudah Inspektorat dalam menentukan Target Pengawasan; 3. Adanya program peningkatan kapasitas dan kapabilitas JFA selama 200 jam per tahun; 4. Adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah daerah dan Pusat; 5. Adanya dukungan Pemerintah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri; 6. Tersedianya berbagai ajang kompetisi yang menilai layanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan motivasi bagi institusi dalam meningkatkan kinerja.	3. Menyediakan fitur unggulan untuk memudahkan masyarakat menerima layanan (Meghubungkan fitur notifikasi aplikasi dengan platform pesan instans seperti whatsapp); 4. Menyediakan Fasilitas yang lebih memadai dari segi layanan Teknologi Informasi; 5. Memberikan dukungan melalui peningkatan kapasitas untuk petugas layanan; 6. Mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh Ormas, LSM, Yayasan dan Forum yang ada di Kabupaten Aceh Barat sehingga dapat bekerja sama dengan baik untuk menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat.	tersebut terlaksana sepenuhnya, serta terpenuhinya fasilitas untuk peningkatan mobilitas pelaksana APIP dalam melaksanakan tugas berupa kendaraan roda 4; 3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti media sosial dalam mensosialisasikan program; 4. Mengalokasikan anggaran untuk mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital sebagai pengganti dokumen kependudukan konvensional, seperti KTP; 5. Melakukan pendekatan khusus dan sosialisasi akan pentingnya data Ormas, LSM, Yayasan dan Rumah Ibadah yang harus dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Stigma negatif masyarakat terhadap inspektorat yang masih menganggap bahwa inspektorat merupakan Lembaga yang melakukan tindak yang merugikan masyarakat; 2. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil; 3. Keadaan ekonomi masyarakat yang cenderung rendah; 4. Masih adanya oknum (Calo) yang mengambil keuntungan dari masyarakat dalam proses administrasi kependudukan.	1. Membuat regulasi yang jelas mengenai mutasi di kalangan JFA; 2. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang capaian yang diperoleh Lembaga Inspektorat; 3. Menyediakan posko pelayanan khusus pada setiap Kecamatan; 4. Menciptakan Inovasi layanan yang membantu masyarakat; 5. Disediakannya program edukasi sebagai upaya mendekatkan inspektorat dengan masyarakat.	1. Mengusulkan formasi tambahan untuk JFA dan PPUPD yang diseleksi dengan baik sehingga mendapatkan JFA dan PPUPD yang terbaik; 2. Melakukan mediasi dan diskusi dengan Pihak Pengelola Keuangan Daerah agar segera melaksanakan Permen no 33 tahun 2019; 3. Menyediakan aplikasi/layanan pelayanan online untuk masyarakat; 4. Mengedukasi masyarakat agar menghindari jasa calo.

3.2. Analisis Kesenjangan Smart Branding

Tabel 39. Kertas Kerja Analisis SWOT Potensi Daerah (*Branding*)

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Terdapat qanun dalam pembangunan sektor wisata Kabupaten Aceh Barat	1. Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata pegawai masih rendah

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Eksternal	- Perkembangan desa wisata berada pada dalam trend positif - Aksesibilitas menuju tempat wisata cenderung sudah baik - Pelayanan masyarakat sudah berbasis aplikasi seperti OOS, SiCantik, SIMBG, Klik n Kring, SiLOPer, dll - Sudah memiliki beberapa staf dengan tingkat pendidikan tinggi - Memiliki beberapa tempat wisata dan tempat olahraga - Aceh barat memiliki padang rumput yang bisa mendukung industri peternakan dalam skala besar - Perkembangan usaha mikro dikalangan ibu rumah tangga berjalan positif - Pertumbuhan Ekonomi Aceh Barat berada dalam trend yang positif - Sektor perkebunan adalah penyumbang terbesar realisasi investasi di Aceh Barat setelah sektor pertambangan.	- Tempat penyimpanan (Cold Storage) belum tersedia untuk menampung kelebihan suplai pada masa panen - Fasilitas rata-rata gedung, sarana dan prasarana masih belum memadai - Sumber Daya Alam utama Aceh Barat batubara, belum digarap secara optimal - Tenaga Ahli IT masih belum memadai - Cakupan Internet belum merata - Koordinasi antar instansi pemerintah Aceh Barat masih kurang kondusif - Kedisiplinan ASN yang kurang baik.
	Peluang - Memungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan istitusi pendidikan baik lokal maupun nasional - Adanya peluang investasi dari investor nasional maupun internasional - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat untuk pengembangan sektor parawisata Aceh Barat	Strategi Peluang dan Kekuatan - Melakukan kerjasama dengan institusi Pendidikan dalam mengembangkan sektor parawisata - Memanfaatkan segala bentuk dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat untuk pengembangan sektor parasiwata - Berpartisipasi secara berkala dalam ajang promosi daerah untuk menggaet investor terutama di sektor perkebunan dan parawisata Strategi Kelemahan dan Peluang - Memanfaatkan segala bentuk Kerjasama dengan institusi Pendidikan dalam untuk peningkatan sumber daya ASN - Penindakan terhadap investor/perusahaan yang belum menggarap tambang batubara secara maksimal

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Hasil pertanian masih banyak didatangkan dari luar daerah 2. Masih banyaknya tengkulak yang menjadi perantara pengumpul hasil berbagai komoditas 3. Adanya pungutan liar di tempat-tempat wisata Adanya intervensi pihak luar dalam setiap pelaksanaan kegiatan	1. Memberdayakan lahan terlantar untuk pengembangan penanaman hortikultur untuk memenuhi kebutuhan daerah 2. Mengembangkan koperasi tingkat Gampong/Desa untuk dapat berpartisipasi dalam pengumpulan hasil komoditas masing-masing 3. Berpartisipasi dalam peninjauan investasi dalam bidang perkebunan dan pertanian baik tingkat nasional maupun internasional 4. Membina dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan di setiap desa yang berdekatan dengan lokasi wisata guna meminimalisir terjadinya pungutan liar di tempat wisata	1. Menyediakan Cold Storage dengan kapasitas yang dapat menampung hasil komoditi daerah, sehingga bisa mengurangi impor dari daerah lain 2. Memperkuat hubungan antar lini di setiap instansi pemerintah kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi intervensi pihak luar dalam setiap kegiatan pemerintah

3.3. Analisis Kesenjangan *Smart Economy*

Tabel 40. Kertas Kerja Analisis SWOT Ekonomi (*Economy*)

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Melakukan pendampingan/ penyuluhan 2. Memberikan bantuan Prasarana Pertanian 3. Adanya Hand Traktor 72 Unit, Traktor 7 Unit dan Combine 7 unit 4. S3 1orang, S2 7 Orang dan S1 75 Orang 5. Penyuluh dan Petani 6. Pernah mendapatkan penghargaan perencanaan Tk. Kab. Aceh Barat Tahun 2022 7. Tersedianya dukungan anggaran	1. Kurangnya Inovasi 2. Tidak ada anggaran untuk melaksanakan Diklat 3. Kurangnya Kendaraan Operasional Lapangan 4. Masih kurangnya ketersediaan Alsintan 5. Kurangnya SDM khususnya dibidang IT 6. Kurangnya biaya operasional penyuluh 7. Kurang ideal jabatan fungsional
Faktor Eksternal	Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan
	1. Hampir 75% masyarakat Aceh Barat bekerja sebagai petani 2. Adanya program pembangunan prasarana pertanian 3. Adanya program pengembangan sarana pertanian 4. Adanya E-absensi meningkatkan disiplin ASN	1. Adanya kelompok-kelompok tani 2. Meningkatkan Indeks Pertanian dari 2 kali menjadi 3 kali 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi Terlaksananya program pembangunan pertanian
		Strategi Kelemahan dan Peluang 1. Dukungan anggaran mengadakan pelatihan petani dalam penerapan teknologi 2. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan 3. Mendorong peran sektor swasta

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
5. Adanya dukungan anaggaran dari APBN, DOKA dan DAK 6. Adanya peluang mendapatkan dana bantuan berupa CSR, zakat		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Terjadinya alih fungsi lahan pangan menjadi lahan non pangan 2. Gagal panen 3. Petani tidak melakukan penanaman serentak 4. Masih ada petani yang tidak menggunakan bibit unggul 5. Petani masih ada yang menggunakan sistem tradisional 6. Image negative hanya sebagian petani/poktan yang memperoleh bantuan 7. Penyaluran bantuan APBN tidak tepat waktu 8. Adanya image negatif yang beredar di kalangan masyarakat tentang penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran	1. Sosialisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Lancarnya akses petani 3. Melakukan penanaman serentak dari 2 kali menjadi 3 kali 4. Melakukan sosialisasi secara terbuka baik di surat kabar maupun di media sosial mengenai penyaluran zakat dan infaq	1. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas petani 2. Menyelenggarakan Diklat khusus untuk upgrading skill penyuluh dalam hal optimalisasi penggunaan sosial media untuk keperluan penyuluhan

3.4. Analisis Kesenjangan *Smart Living*

Tabel 41. Kertas Kerja Analisis SWOT Tempat Tinggal (*Living*)

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai 2. Program penurunan angka stunting berjalan dengan baik 3. Tersedianya hutan dan taman kota yang disediakan pemerintah 4. Tersedianya sistem informasi layanan, seperti layanan bantuan kuliah jalur bidikmisi	1. Sistem informasi pendukung di dinas Kesehatan masih kurang memadai 2. Kerjasama lintas program masih belum berjalan dengan baik 3. Pola hidup sehat masyarakat yang masih sangat rendah 4. Tenaga kerja banyak yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan 5. Kurangnya angkutan massal
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Adanya peluang pemanfaatan sistem informasi Kesehatan yang ada di pemerintah pusat dan provinsi	1. Menyediakan Jaringan Telekomunikasi Informasi yang mudah diakses 2. Menyediakan Sistem Informasi Layanan Publik yang mudah	1. Masih awamnya masyarakat terhadap teknologi informasi 2. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi dalam pelaksanaan kerja sama lintas program

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
2. Adanya kerja sama dengan Lembaga Pendidikan 3. Perkembangan pengguna teknologi internet yang semakin meningkat	3. Tersedianya Sistem Aplikasi Lapor 4. Menyediakan Jambo Wifi / Shelter Wifi	3. Tidak terkontrolnya anak-anak yang menggunakan internet
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Anggapan negatif masyarakat terhadap dinas terkait belum baik 2. Semakin luasnya kerusakan akibat pertambangan baik legal maupun ilegal 3. Terbatas dan Tingginya harga bbm	1. Mengakomodir berita hoax yang beredar 2. Adanya timer hidup mati jaringan wifi 3. Menjaga ketersediaan bbm bagi masyarakat	1. Perangkat Wifi rawan kecurian 2. Banyak jaringan internet shelter yang disalahgunakan (hal negative) 3. Mengantisipasi stabilitas ketersediaan bahan bakar minyak

3.5. Analisis Kesenjangan *Smart Society*

Tabel 42. Kertas Kerja Analisis SWOT Kehidupan Sosial (*Society*)

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Pengembangan Sistem pendidikan Islami 2. Tersedianya staf yang menguasai Teknologi Informasi walaupun belum profesional 3. Memiliki lembaga pelatihan dan industri unggul dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dengan pola magang 4. Adanya potensi pengembangan lahan untuk permukiman transmigrasi 5. Penghargaan akseptor Keluarga Berencana terbanyak se Aceh 6. Tersedianya aplikasi elsimil yang merupakan aplikasi pemantauan calon pengantin	1. Rendahnya pagu anggaran kegiatan 2. Minimnya pendidikan dan pelatihan kepada pegawai 3. Kurangnya tenaga Teknologi Informasi yang profesional yang mengakibatkan penyelesaian tugas bertumpu pada beberapa orang saja
Faktor Eksternal	Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan
	1. Perekrutan pegawai yang berkompeten untuk menunjang aktivitas perkantoran 2. Penambahan anggaran kegiatan 3. pelatihan dan pemagangan dalam membantu mengurangi pengangguran 4. Peruntukan kawasan sebagai rencana lokasi pemukiman transmigrasi	1. Pengembangan sistem pendidikan Islami dengan menjalin hubungan dengan instansi pendidikan dan dayah 2. Memberikan pendidikan dan pelatihan Teknologi Informasi secara kontinu 3. Melakukan pelatihan dan pemagangan untuk para calon pencari kerja 4. Membuat rencana tata ruang wilayah permukiman transmigrasi
		Strategi Kelemahan dan Peluang 1. Penambahan pagu anggaran dan bantuan Provinsi untuk setiap tahunnya 2. Penganggaran biaya untuk pendidikan dan pelatihan bagi pegawai secara kontinu 3. Penyediaan fasilitas Balai Latihan Kerja 4. Penyediaan Kawasan permukiman transmigrasi yang layak 5. Pembuatan aplikasi pelaporan kekerasan secara online

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
5. Jumlah catin yang terdaftar dalam aplikasi elsimil semakin meningkat 6. Adanya tim pendamping keluarga dari desa guna mewujudkan keluarga yang berkualitas	5. Peningkatan jumlah keluarga akseptor dalam mencapai penghargaan keluarga akseptor terbanyak 6. Sosialisasi terkait penggunaan aplikasi elsimil	6. Memberikan edukasi kepada tim pendamping keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dayah 2. Kurangnya kemampuan/skill pekerja lokal dibandingkan dengan non lokal 3. Banyaknya penduduk yang tidak menetap dilokasi transmigrasi karena sarana dan prasarana yang belum memadai 4. Masyarakat mempunyai pemahaman yang salah terkait pemakaian alat kontrasepsi kepada akseptor sebagai cara untuk membatasi keturunan	1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPD 2. Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang lengkap 4. Menargetkan kabupaten Aceh Barat sebagai penghargaan sebagai kabupaten dengan keluarga akseptor terbanyak 5. Sosialisasi aplikasi yang dimiliki OPD dan manfaat yang bisa didapatkan melalui aplikasi tersebut	1. Penambahan anggaran untuk dapat merealisasikan berbagai program 2. Adanya fasilitas gedung kantor yang layak agar masyarakat lebih mengenal Sekretariat MPD 3. Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 4. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang lengkap 5. Memberikan pelatihan guna peningkatan skill Teknologi Informasi 6. Membangun kerja sama yang baik dalam mengedukasi masyarakat terkait pemakaian alat kontrasepsi

3.6. Analisis Kesenjangan *Smart Environment*

Tabel 43. Kertas Kerja Analisis SWOT Lingkungan (*Environment*)

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Memiliki beberapa pelayan terpadu menyangkut dengan lingkungan seperti, pelayanan persampahan, penyewaan alat berat (excavator), pelayanan perizinan, sendot tinja, dan pengaduan kasus lingkungan 2. Aceh Barat sudah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gunung Mata Ie 3. Memiliki sumber daya manusia yang sesuai kompetensi.	1. Banyaknya mobil pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai. 2. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan pendidikannya 3. Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup 4. Masih lemahnya pengawasan terhadap pencemaran lingkungan 5. Koordinasi antar instansi masih lemah

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Eksternal	4. Aceh Barat pernah mendapatkan penghargaan Adipura 2014 dan BPBD terbaik 1 Tingkat Kabupaten se Indonesia 5. Jumlah tenaga kebersihan sebanyak 242 orang dan tenaga Kebencanaan sejumlah 400 an orang 6. Memiliki 3 excavator, 11 truk pengangkut, 1 mobil toilet, 20 unit Damkar dan 1 laboratorium. 7. Memiliki taman hutan kota wisata dan taman kehati 8. Memilki 5 buah pos Kebencanaan / Kebakaran di 5 Kecamatan 9. Memiliki Gedung Escape Building sebagai home base BPBD 10. Baban kebencanaan Aceh Barat memiliki anggaran > Rp. 10 Milyar/tahun	6. Fasilitas Radio dan elektronik / komunikasi yang belum memadai 7. Jumlah Tenaga Kebencanaan yang bersertifikat yang masih kurang
	Peluang 1. Adanya dukungan keuangan sebesar 11 miliar setiap tahunnya dari pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup. 2. Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya pemulihan lingkungan. 3. Adanya dukungan pengembangan sumber daya manusia dari pemerintah daerah untuk mengikuti diklat nasional. 4. Adanya kerjasama perusahaan dan lintas sektor terkait seperti pertamina dengan memberikan drum minyak untuk pengadaan tong sampah yang dibagikan ke masyarakat 5. Penanganan Kebencanaan	Strategi Peluang dan Kekuatan 1. Meningkatkan pelayanan publik yang cerdas dan inovatif 2. Meningkatkan nilai operasionalisasi TPA Kabupaten Aceh Barat > 71 3. Mengoptimalkan fungsi hutan kota dan ruang terbuka hijau (RTH) 4. Terus membenahi personil Tenaga Kebencanaan yang memadai dan berpengalaman untuk mendapatkan pilot project Kebencanaan Nasional. 5. Mencari Pendanaan yang mudah (Non/government) 6. Melakukan Peningkatan kapasitas sdm personil kebersihan dan kebencanaan dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga penelitian dalam dan luar negeri 7. Ikut berpartisipasi dalam setiap program/kegiatan kebencanaan di provinsi maupun nasional.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
menjadi stressing dari Pemerintah Pusat baik secara regulasi maupun secara anggaran 6. Didukung regulasi dan anggaran DOKA setiap tahun 3 Milyar 7. Menjadi salah satu pusat rujukan edukasi kegempaan Nasional (Tsunami 2004)	8. Menambah sarana dan prasarana pendukung kebencanaan.	
Ancaman 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah pada tempatnya 2. Menurunnya semangat gotong royong masyarakat terhadap lingkungan 3. Meningkatnya pertumbuhan industri dari berbagai sektor diantaranya sektor pertambangan, perkebunan, pembangkit listrik, dan pengolahan emas yang dapat merusak Sumber Daya Alam (SDA), seperti adanya pencemaran limbah batubara, limbah sungai akibat tambang emas Kondisi Geo-politik Internasional mempengaruhi Kebijakan Nasional/Provinsi/Daerah) seperti Krisis ekonomi (defisit anggaran)/wabah mempengaruhi alokasi anggaran kebencanaan dan Image negative di kalangan Masyarakat bahwa kalau ada bencana baru ada proyek.	Strategi Ancaman dan Kekuatan 1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dengan melakukan sosialisasi secara berkala 2. Mendorong pelaku usaha/kegiatan agar menaati aturan lingkungan hidup 3. Mengoptimalkan asset secara maksimal dan efisien sebagai Tindakan preventif menghadapi krisis global. 4. Memperkuat / soliditas koordinasi antar Lembaga dalam menghadapi musibah/tantangan akibat krisis global; 5. Memperkuat ketahanan pangan dan sosialisasi pemahaman kebencanaan kepada masyarakat luas. 6. Memperbaiki image negative masyarakat dengan melakukan kegiatan mitigasi bencana dan melibatkan unsur masyarakat dalam Tim Desa Tangguh/ Kecamatan Tangguh yang memiliki nilai hak dan tanggungjawab didalamnya.	Strategi Kelemahan dan Ancaman 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang terkontrol terhadap aktifitas perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat 2. Melakukan penyuluhan lingkungan hidup dengan menggunakan berbagai jenis media social yang tersedia 3. Mempercepat pengadaan peralatan elektronik dan operasionalnya 4. Melakukan pelatihan kepada Petugas sehingga memiliki sertifikasi lebih banyak. 5. Mengajukan dan meningkatkan anggaran Mitigasi bencana 6. Membentuk Desa/ Kecamatan Tangguh 7. Membuat/ mengadakan aplikasi kebencanaan yg dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat walaupun dalam keadaan offline. 8. Membuat Kegiatan “ Simulasi Bencana” secara berkala, sebagai upaya melatih/memantapkan kesiapsiagaan semua komponen terhadap bencana dengan melibatkan seluruh komponen, pemerintah, Masyarakat, Swasta, Organisasi Masyarakat, dll